



RENCANA STRATEGIS

DINAS
PERHUBUNGAN
2025-2029



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029



**PEMERINTAHAN KOTA
BEKASI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini sangat bergantung pada kerja sama, koordinasi, dan sinergi antarpemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Bekasi, 19 September 2025

Kepala Dinas Perhubungan



Ir. Zeno Bachtar, S.Si.T., M.Si., M.T.

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19730211 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN	14
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan	14
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	14
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	24
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	28
2.1.4 Kelompok Sasaran Dinas Perhubungan	47
2.1.5 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Jawa Barat	50
2.1.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	55
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan	58
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN	68
3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan	68
3.2 Perumusan Tujuan Renstra Dinas Perhubungan	70
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan 2025-2029.....	76
3.3.1 Strategi Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029	76
3.3.2 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029	83
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN	86
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.....	86
4.2 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	118
4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	121
4.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI.....	122
4.5 DUKUNGAN TERHADAP PENCAPAIAN JABAR ISTIMEWA	123
4.6 DUKUNGAN TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BEKASI	125
BAB 5.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2025	24
Tabel 2.2. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Dinas Perhubungan Tahun 2025	24
Tabel 2.3. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan Dinas Perhubungan Tahun 2025	24
Tabel 2.4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Pangkat/Golongan Dinas Perhubungan Tahun 2025	25
Tabel 2.5. Pendidikan PNS Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025	25
Tabel 2.6. Pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025	26
Tabel 2.7. Kendaraan Dinas Perhubungan	26
Tabel 2.8. Peralatan Kantor Dinas Perhubungan	26
Tabel 2.9. Fasilitas Lalu Lintas Dinas Perhubungan	27
Tabel 2.10. Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2020-2024	29
Tabel 2.11. Analisis Realisasi Indikator Sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi	34
Tabel 2.12. Penilaian SAKIP	36
Tabel 2.13. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024	38
Tabel 2.14. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2020-2024	40
Tabel 2.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	42
Tabel 2.16. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perhubungan	63
Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan	73
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi	78
Tabel 3.3. Penetapan Strategi Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2026-2029	82
Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029	84
Tabel 4.1. Teknik Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	88
Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	101
Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	119
Tabel 4.4. IKU Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2030	121
Tabel 4.5. IKK Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2030	122
Tabel 4.6 Dukungan Dinas Perhubungan terhadap JABAR Istimewa Langkah Kahiji	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. 7

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi 23

Gambar 3.1.Konsep Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD69

Gambar 3.2.Cascading Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 75

Gambar 4.1.Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD 86

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam konstelasi pembangunan Provinsi Jawa Barat dan kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur). Dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, kontribusi Kota Bekasi tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai 4,56 persen, menempatkan Kota Bekasi di peringkat keenam dari 27 kabupaten/kota pada tahun 2024. Sementara itu, dalam skala Jabodetabekpunjur, Kota Bekasi berfungsi sebagai wilayah penyangga utama Jakarta, dengan kualitas sumber daya manusia yang cukup tinggi, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 83,55, hanya sedikit di bawah Kota Tangerang Selatan.

Pencapaian tersebut menjadi bagian dari kontribusi nyata pembangunan Kota Bekasi terhadap Provinsi Jawa Barat dan nasional, sekaligus menjadi modal penting untuk mendukung visi nasional mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Untuk itu, Kota Bekasi sesuai dengan kewenangannya perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menyongsong periode pemerintahan baru hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024, dengan terpilihnya Dr. H. Tri Adhianto T, SE, MM dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025–2029, Kota Bekasi berkewajiban menyusun RPJMD Tahun 2025–2029. Penyusunan ini menjadi implementasi Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan penyusunan dan pengajuan RPJMD untuk dibahas bersama DPRD dalam waktu paling lama enam bulan setelah pelantikan.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 akan menjadi operasionalisasi visi, misi, dan program prioritas kepala daerah, berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025–2045 dengan visi

“Kota Bekasi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Ihsan”. Fokus utama tahap pertama RPJPD ini adalah memperkuat fondasi pembangunan melalui penguatan modalitas sumber daya Kota Bekasi. Selain itu, RPJMD ini juga harus selaras dengan RPJMN Tahun 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, terutama dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita dan mewujudkan Jabar Istimewa.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara bersamaan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029, termasuk Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Renstra ini menjadi dokumen strategis untuk menjamin kesinambungan pembangunan sektor transportasi, meningkatkan capaian kinerja pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat Kota Bekasi. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 menekankan pendekatan teknokratik melalui manajemen strategik, logic model, berpikir sistem, dan sistem dinamik. Diharapkan, dokumen ini dapat menjadi panduan dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi di Kota Bekasi selama lima tahun ke depan, dalam rangka mewujudkan Kota Bekasi yang maju, berdaya saing, berkelanjutan, dan ihsan.

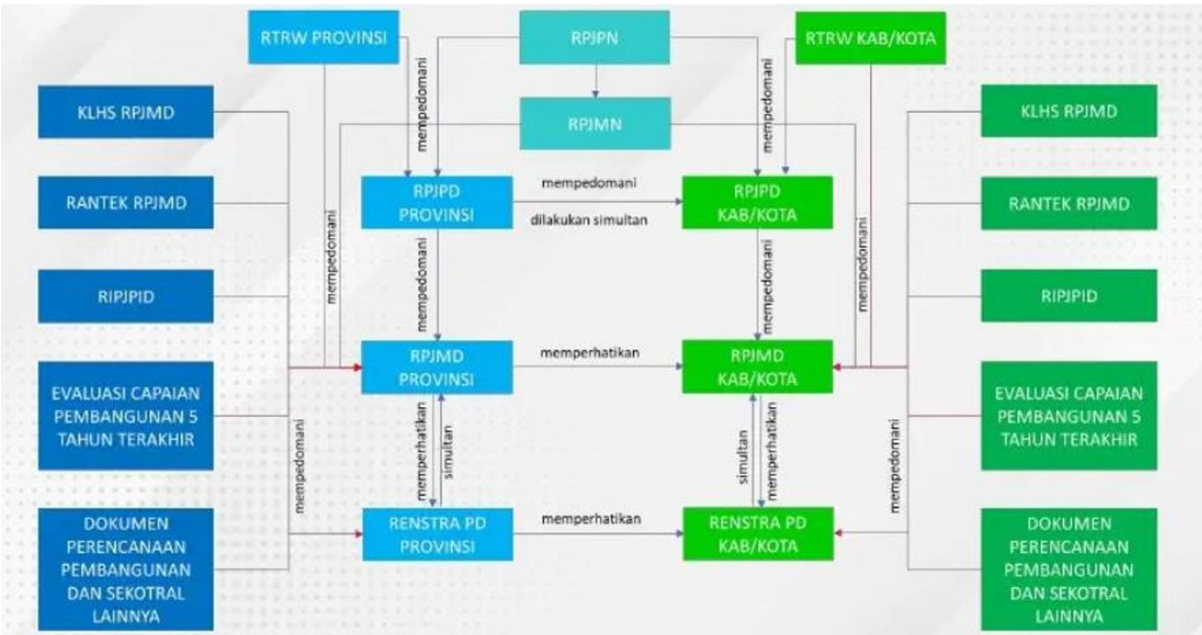
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045, Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun (2025-2029).

Sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam Pembangunan Daerah. Renstra Perangkat

Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 berjalan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD. Renstra disusun melalui tahapan antara lain: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Renstra; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra; dan (6) Penetapan Renstra.

Gambar 1.1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Dinas Perhubungan Kota Bekasi sebagai salah OPD di Kota Bekasi memiliki tugas membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman di Kota Bekasi, maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan bidang perhubungan yang terjadi di Kota Bekasi. Rumusan permasalahan

perhubungan diperoleh dari *Focussed Group Discussion (FGD)* yang dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan serta mengacu pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Di samping itu, terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi dilandasi dengan perundang-undangan dan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018 - 2029;
11. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan;
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Izin Trayek;
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal;
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044;

34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12).
37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10).
38. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 551.21/Kep.350-DLLAJ/2001 tentang Penetapan Lintasan Trayek dan Jumlah Kebutuhan Angkutan Kota Pada Setiap Lintasan Trayek di Kota Bekasi;
39. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; dan
40. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen perencanaan pembangunan sektor perhubungan Kota Bekasi.

Adapun tujuan penyusunannya Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi,yaitu:

1. Memberikan arah pembangunan sektor perhubungan Kota Bekasi selama 5 tahun;

2. Menyiapkan tolok ukur sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggung jawabannya;
3. Sebagai langkah penyusunan program kerja Dinas Perhubungan yang berkelanjutan;
4. Membantu dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
5. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Instruksi Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan sesuai dengan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi dan proses penyusunan Renstra.
- 1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perhubungan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan.
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan.
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

- 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan struktur organisasi Dinas Perhubungan, serta uraian tugas dan fungsi
 - 2.1.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia dan aset.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator lainnya.

2.1.4. Kelompok sasaran layanan Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan singkat tentang sasaran pelayanan kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan

2.1.5. Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Mengemukakan apa saja faktor penghambat atau pun faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Perhubungan provinsi/kabupaten/kota.

2.1.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

2.2.1. Permasalahan -permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. serta review terhadap faktor-faktor dari pelayanan perhubungan

2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis Pelayanan Dinas Perhubungan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan

3.2 Perumusan Tujuan Renstra Dinas Perhubungan

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Dinas

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

BAB VI PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Bekasi dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melalui perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan serta pengelolaan administrasi untuk mendukung kelancaran lalu lintas, angkutan, prasarana, dan keselamatan transportasi di daerah.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi, terdiri atas:

Kepala Dinas;

Sekretariat;

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan;

Bidang Teknik Lalu Lintas;

Bidang Angkutan dan Terminal;

Bidang Prasarana;

Bidang Pengendalian dan Operasional;

UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir;

UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Perhubungan Kota Bekasi memiliki fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja di bidang perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Peran Dinas perhubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mencakup bidang transportasi, lalu lintas dan sarana prasarana perhubungan. Tugas pokok dan fungsi pejabat yang ada di Dinas Perhubungan diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang teknik lalu lintas, angkutan dan terminal, prasarana, serta pengendalian dan operasional.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretaris, Bidang-bidang, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perhubungan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada rencana strategis Dinas;
- c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. Pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretaris dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

3) Bidang Teknik Lalu Lintas

Bidang Teknik Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan pengembangan lalu lintas untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Teknik Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;

- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Perumusan kebijakan, perencanaan, analisa, rekomendasi dan perhitungan dalam pelaksanaan manajemen lalu lintas;
- d. Perumusan kebijakan, perencanaan, analisa, inventarisasi, perhitungan dan pemasangan dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas;
- e. Perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi, fasilitasi, penyusunan, pengembangan, pemeliharaan, penyediaan dan pengolahan serta penelitian dalam pelaksanaan pengembangan lalu lintas;
- f. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4) Bidang Angkutan dan Terminal

Bidang Angkutan dan Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan pembinaan terminal untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Angkutan dan Terminal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan, pemeriksaan, pengawasan, rekomendasi dan pembinaan dalam pelaksanaan angkutan dalam trayek;
- d. Perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan, rekomendasi, pembinaan dan Penyediaan serta pemeliharaan dalam pelaksanaan angkutan dalam trayek;

- e. Perumusan kebijakan, perencanaan, penetapan, pengkajian, pengembangan, pembinaan dan pengaturan serta pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan terminal;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

5) Bidang Prasarana

Bidang Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi prasarana transportasi, pengujian prasarana dan bina perpustakaan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Perumusan kebijakan, perencanaan, perawatan dan pengembangan dalam pelaksanaan prasarana transportasi;
- d. Perumusan kebijakan, perencanaan, pengujian, pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan pengujian sarana;
- e. Perumusan kebijakan, perencanaan, penetapan, rekomendasi, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan bina perpustakaan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

6) Bidang Pengendalian dan Operasional

Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi

penindakan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), pembinaan keselamatan lalu lintas serta pengendalian lalu lintas untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi, penindakan, dan penertiban dalam pelaksanaan penindakan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, penyusunan, koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan keselamatan lalu lintas;
- e. Perumusan kebijakan, perencanaan, pengendalian, pengaturan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengendalian lalu lintas;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

7) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir

UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Dinas di bidang lalu lintas, angkutan dan parkir. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program Dan Rencana Kegiatan UPTD;
- b. Pengawasan Dan Pengendalian Tugas Yang Dilaksanakan Bawahan;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran;
- d. Pembinaan Petugas Operasional Pada Unit Kerjanya;
- e. Pemberian Pelayanan Terhadap Masyarakat Di Bidang Tugasnya;
- f. Pendistribusian Tugas-Tugas Kepada Bawahan Menurut Prinsipprinsip Manajemen;
- g. Pelaksanaan Sebagian Tugas Teknis Di Bidang Tertib Perparkiran, Lalu Lintas, Angkutan Dan Sarana Perhubungan;

- h. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas UPTD;
- i. Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Dengan Lembaga Non Pemerintah Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku;
- j. Pelaksanaan Koordinasi Dengan Unsur Perangkat Daerah Terkait;
- k. Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan UPTD;
- l. Pelaksanaan Koordinasi Dengan Kecamatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan UPTD;
- m. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas;
- n. Pemberian Laporan Pertanggungjawaban Tugas UPTD Kepada Kepala Dinas, Secara Administratif Melalui Sekretaris Dan Secara Teknis Operasional Kepada Kepala Bidang Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya.

8) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir dan UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum

UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir merupakan unit kerja di bawah Dinas Perhubungan kota Bekasi yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, pelayanan, serta pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan perparkiran. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Penyusunan rencana pengembangan dan pemeliharaan Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan perlengkapan jalan dan fasilitas parkir.
- c. Memastikan sistem penerangan jalan beroperasi dengan baik.
- d. Mengelola sistem kontrol (manual/otomatis) penerangan jalan.
- e. Melakukan pemeliharaan rutin infrastruktur penerangan jalan.
- f. Memperbaiki kerusakan lampu jalan, tiang lampu, dan jaringan listriknya.
- g. Mengganti komponen yang rusak atau tidak efisien.
- h. Memantau kinerja lalu lintas jalan.
- i. Berkoordinasi dengan instansi terkait (seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan) terkait gangguan atau kebutuhan perlengkapan jalan.
- j. Membuat laporan kinerja dan kebutuhan anggaran kepada dinas induk

UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum (PPJU) merupakan unit kerja di bawah Dinas Perhubungan kota Bekasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian penerangan jalan umum. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Penyusunan rencana pengembangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum.
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan penerangan di jalan-jalan umum.
- c. Merencanakan pengadaan dan pemasangan lampu jalan.
- d. Melaksanakan pemasangan, penggantian, dan perbaikan lampu jalan.
- e. Memastikan sistem penerangan jalan beroperasi dengan baik.
- f. Mengelola sistem kontrol (manual/otomatis) penerangan jalan.
- g. Melakukan pemeliharaan rutin infrastruktur penerangan jalan.
- h. Memperbaiki kerusakan lampu jalan, tiang lampu, dan jaringan listriknya.
- i. Mengganti komponen yang rusak atau tidak efisien.
- j. Memantau kinerja penerangan jalan umum.
- k. Mengevaluasi efektivitas sistem penerangan.
- l. Melakukan pemeriksaan kelayakan instalasi.
- m. Berkoordinasi dengan PLN atau penyedia energi listrik terkait pasokan daya.
- n. Berkoordinasi dengan instansi terkait (seperti Satpol PP, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kecamatan, Dinas Tata Ruang) terkait gangguan atau kebutuhan penerangan.
- o. Membuat laporan kinerja dan kebutuhan anggaran kepada dinas induk.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

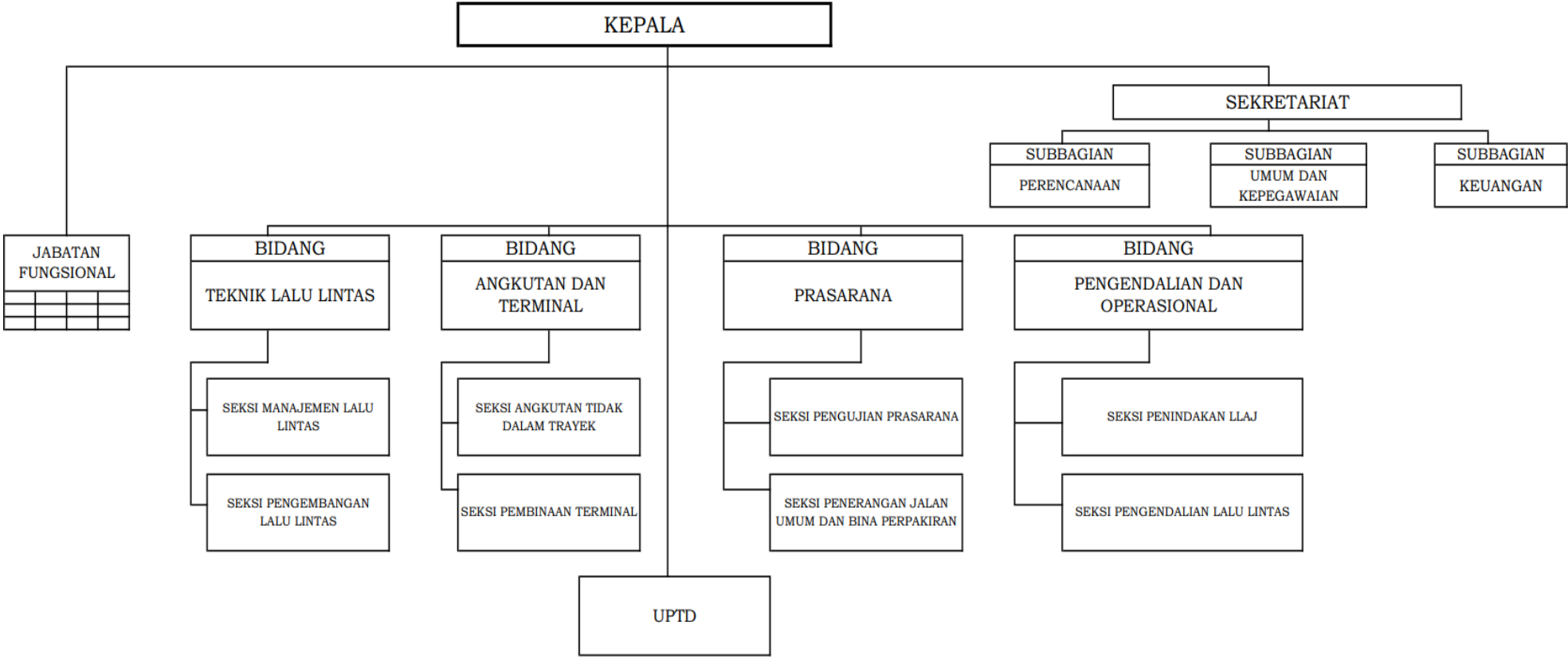
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sub-Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.
- (3) Sub-Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Kelompok Substansi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian tugas Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Teknik Lalu Lintas, membawahkan:
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Seksi Pengembangan Lalu Lintas;
4. Bidang Angkutan dan Terminal, membawahkan:
 - a. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
 - b. Seksi Pembinaan Terminal;
5. Bidang Prasarana, membawahkan:
 - a. Seksi Pengujian Sarana;
 - b. Seksi Penerangan Jalan Umum dan Bina Perpakiran;
6. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahkan:
 - a. Seksi Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b. Seksi Pengendalian Lalu Lintas;
7. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir;
8. UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi



Sumber : Peraturan walikota nomor 19 Tahun 2024

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pehubungan Kota Bekasi hingga tahun 2025 didukung oleh personil sebanyak 1.085 orang, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2025

No.	Jenis Kepegawaian	L	P	Jumlah	
I.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	108	18	126	orang
II.	Pegawai Pemerintahan Pekerja Kontrak (PPPK)	746	163	909	orang
III.	PJLP	42	8	50	orang
Jumlah Keseluruhan Pegawai		896	189	1085	orang

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi berdasarkan Jabatan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Dinas Perhubungan Tahun 2025

No.	Nama Jabatan	Jumlah	
1.	Struktural	28	orang
2.	Fungsional Tertentu/Khusus	12	orang
4.	Jabatan Fungsional Umum	86	orang
JUMLAH		126	orang

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi berdasarkan pangkat/golongan sebagaimana pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan Dinas Perhubungan Tahun 2025

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah	
1.	Golongan / I C	1	Orang
2.	Golongan / II A	3	Orang
3.	Golongan / II B	1	Orang
4.	Golongan / II C	14	Orang
5.	Golongan / II D	11	Orang
6.	Golongan / III A	18	Orang
7.	Golongan / III B	31	Orang
8.	Golongan / III C	5	Orang
9.	Golongan / III D	28	Orang
10.	Golongan / IV A	12	Orang
11.	Golongan / IV B	2	Orang
12.	Golongan / IV C		

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah	
JUMLAH		126	orang

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi berdasarkan pangkat/golongan sebagaimana pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Pangkat/Golongan Dinas Perhubungan Tahun 2025

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah	
1.	Golongan / IX	209	Orang
2.	Golongan / VI	50	Orang
3.	Golongan / V	636	Orang
4.	Golongan / II	12	Orang
5.	Golongan / I	2	Orang
Jumlah		909	Orang

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi berdasarkan jenjang pendidikan sebagaimana pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Pendidikan PNS Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jumlah	
1.	S2 (Magister	19	Orang
2.	S1 (Sarjana)	58	Orang
3.	"D3 (Sarjana Muda)	2	Orang
4.	SLTA (Sederajat)	42	Orang
5.	SLTP (Sederajat)	4	Orang
6.	SD (Sederajat)	1	Orang
JUMLAH		126	Orang

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi berdasarkan jenjang pendidikan sebagaimana pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6. Pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah	
1.	S1 (Sarjana)	209	Orang
2.	D3(Sarjana Muda)	50	Orang
3.	SLTA (Sederajat)	636	Orang
4.	SLTP (Sederajat)	12	Orang
5.	SD (Sederajat)	2	Orang
JUMLAH		909	Orang

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

B. Sarana Prasarana Aparatur

Dalam menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.7. Kendaraan Dinas Perhubungan

No.	Jenis Kendaraan	kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Sepeda motor	129 unit	-	129 unit
2	Sepeda Motor Listrik	6 unit	-	6 unit
3	Mobil roda 6	3 unit	-	3 unit
4	Mobil roda 4	23 unit	3 unit	26 unit
Jumlah		161 unit	3 unit	164 unit

Sumber: Kartu Inventaris Barang Tahun 2025

Dalam melaksanakan pekerjaan aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi didukung oleh sarana dan prasarana kantor berjumlah 1.965 unit/buah dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.8. Peralatan Kantor Dinas Perhubungan

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Note Book	4	unit	
2	P.C Unit	136	unit	
3	Alat Kantor Lainnya	71	unit	
4	Mini Komputer	4	unit	
5	Tablet PC	26	unit	
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	107	unit	
7	Alat Penghancur Kertas	5	unit	
8	A.C Sentral	1	unit	
9	A.C. Split	32	unit	
10	A.C. Window	11	unit	
11	Handy Talky (HT)	205	unit	
12	Filing Cabinet Besi	45	buah	
13	Filing Cabinet Kayu	2	buah	
14	Bangku Tunggu	21	buah	

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
15	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	129	buah	
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon	102	buah	
17	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	buah	
18	Kursi Rapat	340	buah	
19	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	5	buah	
20	Kursi Tamu	12	buah	
21	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	107	buah	
22	Lemari Kaca	2	buah	
23	Lemari Penyimpan	4	buah	
24	Meja 1/2 Biro	344	buah	
25	Meja Bundar	4	buah	
26	Meja Kerja	6	buah	
27	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	175	buah	
28	Meja Kerja Pejabat Eselon	38	buah	
29	Meja Rapat	22	buah	
	Jumlah	1.965	Unit/buah	

C. Sarana dan Prasaran Fasilitas Perlengkapan Jalan

Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga memiliki fasilitas perlengkapan jalan dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.9. Fasilitas Lalu Lintas Dinas Perhubungan

No	Uraian / Unit Barang	Satuan	Jumlah Keseluruhan	Kondisi			Ket
				BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	Papan Nama Jalan	UNIT	199,00	87,00	62,00	51,00	
2	Cermin Cembung Tikungan Uk. 90	UNIT	271,00	101,00	50,00	40,00	
3	Cermin Cembung Tikungan Uk. 80	UNIT	301,00	65,00	10,00	-	
4	Traffic Cone	UNIT	863,00	444,00	225,00	192,00	
5	Water Barrier	UNIT	228,00	198,00	85,00	70,00	
6	Speed Bamb	M	1.136,00	382,00	42,00	50,00	
7	MCB Beton	UNIT	217,00	120,00	120,00	97,00	
8	Marka Jalan	M2	17.676,03	8.270,08	5.096,61	4.169,95	
9	Rambu Lalin Standar Uk. 60	UNIT	743,00	450,00	236,00	194,00	
10	Rambu Lalin Standar Uk. 75	UNIT	32,00	18,00	18,00	14,00	
11	Rambu Lalin Standar Uk. 90	UNIT	9,00	4,00	4,00	5,00	
12	Rambu Lalin Standar Berikut Papan Tambahan	SET	438,00	247,00	42,00	35,00	
13	Rambu Standar Kupu-Kupu	UNIT	58,00	32,00	32,00	26,00	
14	Rambu Lalin Tipe F	UNIT	84,00	47,00	45,00	37,00	
15	Rambu Lintasan Ka	UNIT	1,00	1,00	-	1,00	
16	Rambu RPPJ	UNIT	155,00	84,90	64,90	53,10	
17	Rambu Rppj Kantilever	UNIT	5,00	2,00	-	1,00	
18	Rambu Lalin Papan Jurusan Trayek	UNIT	17,00	13,00	13,00	4,00	
19	Rambu Lalin Papan Nama Halte	UNIT	4,00	3,00	2,00	2,00	

No	Uraian / Unit Barang	Satuan	Jumlah Keseluruhan	Kondisi			Ket
				BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
20	Rambu Himbauan 2 Tiang	UNIT	70,00	34,10	34,00	28,00	
21	Rambu Himbauan Tipe F	UNIT	50,00	33,00	33,00	15,00	
22	Relling / Pagar Portable	UNIT	124,00	84,00	49,00	40,00	
23	Rambu Portable	UNIT	234,00	143,00	43,00	35,00	
24	Pagar Pembatas Permanen	UNIT	102,00	56,00	56,00	46,00	
25	Road Stoad	BH	2.242,00	1.733,00	620,00	509,00	
26	Road Stoad Solar Cell	BH	500,00	434,00	51,00	15,00	
27	Traffic Light	SIMPANG	9,00	4,00	4,00	4,00	
28	Lampu Warning Light	SET	28,00	16,00	13,00	11,00	
29	LED	UNIT	6,00	3,00	-	-	
30	Countdown	UNIT	8,00	3,00	3,00	3,00	
31	Guardrill	M	392,00	237,20	189,20	154,80	
32	Lampu Aspek Wl Kantiliver	UNIT	2,00		2,00		
33	Ruang Henti Kendaraan (Rhk)	LOK	3,00	2,00	2,00	1,00	
34	Zona Selamat Sekolah(Zoss)	LOK	13,00	6,00	4,00	3,00	
35	Marka Jalur Sepeda	UNIT	800,00	304,43	304,43	249,08	
36	DELINIATOR	UNIT	32,00	17,00	17,00	14,00	
37	Pemasangan IP Kamera Ptz +Audio Annouser	SET	1,00	1,00	-	-	
38	Pemasangan Link Komunikasi FO	PAKET	1,00	1,00	-	-	
39	Pemasangan Rute Aman Selamat Sekolah (Rass)	LOKASI	6,00	6,00	-	-	
40	Peningkatan Alat Counting Portable	UNIT	1,00	1,00	-	-	
41	Penerangan Jalan Umum	Unit	62.742	32.204	25.763	6.441	

Sumber: Bidang Teknik Lalu Lintas, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam Bab ini diukur berdasarkan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 2.10. Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI RENSTRA TAHUN					CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Nilai AKIP Dishub	N/A	BB	A	A	78,5	N/A	BB	BB	BB	80,030	N/A	100%	90%	90%	102%
2	MENINGKATNYA PENANGANAN KEMACETAN LALU LINTAS	Persentase Peningkatan titik kemacetan yang tertangani	N/A	43,33% (5 titik)	60% (5 titik)	80% (6 titik)	80% (6 titik)	N/A	43,33% (5 titik)	60% (5 titik)	80% (6 titik)	80% (6 titik)	N/A	100%	100%	100%	100%
3	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi	N/A	7,84%	7,84%	8,96%	9,00%	N/A	7,84%	7,84%	8,96%	7,56%	N/A	100%	100%	100%	84%

Sumber: Data Diolah.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil dicapai sepenuhnya pada tahun 2020 sampai 2024.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas pada tahun 2020 sampai 2024, diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani dengan capaian kinerja sebesar 100 persen (tercapai) dengan realisasi penanganan 22 titik kemacetan pada sebagai berikut :

1. Simpang Kemang;
2. Simpang Jati Sampurna;
3. Simpang Rawa Bugel;
4. Simpang Pasar Kranji;
5. Simpang Cimuning;
6. Simpang Cipendawa;
7. Simpang Tol Timur Jatimulya;
8. Simpang Stasiun Kranji;
9. Jalan Hankam;
10. Simpang Gamprit Pondok Gede;
11. Simpang Sawo;
12. Simpang Jatibening;
13. Simpang Pertigaan Pondok Hijau;
14. Simpang H.Masan;
15. Simpang Kemang;
16. Simpang Hankam;
17. Simpang Rumpikal;
18. Simpang Sawo;
19. Simpang Presdo;
20. Simpang RS Bella;
21. Simpang Sumir;
22. Simpang Tol Timur Jatimulya.

Maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas telah tercapai.

Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah menetapkan 1 (satu) indikator yaitu : Persentase

peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang laik fungsi dengan capaian kinerja 78 persen (belum tercapai), maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan belum tercapai sepenuhnya. Dan untuk mencapai sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah menetapkan 1 (satu) indikator yaitu : Nilai Evaluasi AKIP dengan capaian kinerja 102 persen. Nilai Evaluasi AKIP yang diperoleh Dinas Perhubungan sebesar 80,03 sedangkan target adalah 78,50. Maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja telah tercapai.

Dari table 2.11 dapat dianalisis capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi, sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani

Sebagai Kota Penyangga Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Kota Bekasi mengemban berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat perdagangan, industri dan tempat tinggal serta adanya pelaksanaan proyek nasional yang dilaksanakan di Kota Bekasi antara lain pelaksanaan proyek nasional yang dilaksanakan di Kota Bekasi antara lain pembangunan LRT/Light Rail Transit, pembangunan proyek SPAM Regional Jatiluhur 1 dan Pembangunan DDT/Double-Double Track lintasan kereta api, proyek pemasangan pipa pada Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jalan Hasibuan Kecamatan Bekasi dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap kondisi transportasi dan lalu lintas di Kota Bekasi. Kemacetan lalu lintas masih menjadi isu strategis yang dipengaruhi oleh tingkat pelayanan jaringan jalan (Level of Service/LOS) cukup rendah masih terdapat 24 titik kemacetan prioritas yang menjadi target penanganan dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026.

Indikator ini mendukung keberhasilan dalam pencapaian titik kemacetan yang teratasi yang termasuk dalam Sasaran Kedua RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan” sejalan dengan Tujuan “Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan

Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan” Penanganan kemacetan merupakan salah satu program dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dibidang transportasi dan lalu lintas angkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Sebagai pelaksanaan dari Perpres tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 551.1/944-Setda.TU Tentang Penataan Ijin Trayek, Titik Kemacetan, Penempatan Petugas Lalu Lintas di Kota Bekasi. Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 terdapat 24 titik/simpang kemacetan yang menjadi target penanganan dalam 3 (tiga) tahun, untuk Tahun 2024 Target penanganan kemacetan sebanyak 6 titik/simpang yaitu : Simpang Rumpikal, Simpang Sawo, Simpang Presdo, Simpang RS Bella, Simpang Sumir, Simpang Tol Timur Jatimulya.

dari Indikator Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani tahun 2024 sebesar 80 persen, sementara realisasi mencapai 80 persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani sebesar 100 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2024 sudah tercapai. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah Jumlah Titik Kemacetan yang tertangani di Kota Bekasi pada Tahun 2024 dibagi Jumlah target penanganan titik kemacetan di Kota Bekasi pada Tahun 2024 dikali 100%.

2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang laik fungsi

Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan transportasi dimulai, ke tempat tujuan, ke mana kegiatan transportasi diakhiri. Dalam hubungan ini terlihat bahwa unsur-unsur transportasi meliputi: (a) ada muatan yang diangkut, (b) tersedia kendaraan sebagai alat angkutnya, (c) ada jalanan yang dapat dilalui, (d) ada terminal asal dan terminal tujuan, (e) sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut. Moda transportasi darat kemudian lebih dikenal dengan istilah Lalu Lintas Angkutan Jalan, menurut Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang LLAJ, menjelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Sarana dan Prasarana lalu lintas merupakan ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. Dalam hal untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dan juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas maka diperlukannya pengawasan kelaikan jalan terhadap sarana dan prasarana. Sehingga sarana dan prasarana yang tersedia adalah sarana prasarana perhubungan yang laik fungsi demi menjamin keselamatan pengguna jalan di Kota Bekasi.

Terminal sebagai lokasi asal dan tujuan perjalanan memainkan peranan penting untuk pengaturan kendaraan umum. Luasan terminal yang memadai untuk keperluan sirkulasi, parkir, kedatangan dan fasilitas operasional baik utama maupun pendukung menjadi hal yang sangat yang diperlukan. Untuk melayani naik turunnya penumpang dan perpindahan intra dan / atau moda transportasi, Kota Bekasi saat ini memiliki 1 buah terminal induk dan 2 sub terminal. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah Jumlah fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan (terminal, halte dan rambu) dikali 100%.

Dengan melihat tabel 2.11 tersebut diatas bahwa target tahun 2024 dari Indikator Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi tahun 2024 sebesar 9 persen, sementara realisasi mencapai 7 persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi sebesar 78 persen. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2024 belum tercapai. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah Jumlah fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia pada Tahun

2024 dibagi Jumlah prasarana dan sarana yang dibutuhkan pada Tahun 2024 dikali 100%. Untuk perhitungan realisasi Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11. Analisis Realisasi Indikator Sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Fisik TA 2024 (%)	Realisasi Fisik TA 2024 (%)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	78
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	100
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	100	35
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100	100
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	100	95
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100	90
4	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	90
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	33
Total Rata-rata			100	78

Sumber LKIP 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Target dari Jumlah prasarana dan sarana yang dibutuhkan pada Tahun 2024 sebesar 100 persen dari setiap sub kegiatan pendukung sedangkan realisasi dari Jumlah fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia pada Tahun 2024 sebesar 78 persen. Sehingga apabila target fisik sebesar 100 persen dengan

target capaian sebesar 9 persen dan realisasi fisik sebesar 78 persen maka realisasi capaian sebesar 7 persen menggunakan perhitungan *cross product*.

$$Realisasi = \frac{78 \times 9}{100} \times 100\%$$

Adapun faktor penyebab kegagalan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang indikator Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Laik Fungsi belum berjalan dengan baik dan perlu melakukan perbaikan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan halte tidak tercapai dikarenakan kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu hasil audit investigasi pekerjaan pemeliharaan halte tahun 2023.
2. Untuk kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan melakukan upaya restrukturisasi terhadap PT Mitra Patriot Kota Bekasi agar dapat memulihkan dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Adapun faktor keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain

1. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah membuka koridor baru untuk transpatriot yaitu dengan trayek wisma asri-sumber artha dan summarecon-vida bantar gebang.
 2. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan pembangunan dan pemeliharaan 14 halte terkait dengan prasarana perhubungan yang laik fungsi.
 3. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan pengadaan dan pemeliharaan rambu/marka terkait dengan sarana perhubungan yang laik fungsi.
3. Nilai Evaluasi AKIP

Nilai evaluasi AKIP merupakan salah satu indikator untuk mencapai Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Pada Tahun 2024 indikator Nilai Evaluasi AKIP sesuai

dengan Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Perhubungan Kota Bekasi ditetapkan Target 78,50 sementara realisasi hasil Nilai Evaluasi AKIP 80,03 dengan demikian capaian pada indikator ini sebesar 102 persen.

Tabel 2.12. Penilaian SAKIP

No.	Komponen yang dinilai	2024	
		Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30	23,82
b	Pengukuran Kinerja	30	23,88
c	Pelaporan Kinerja	15	12,02
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,31
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,03
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Sumber : LHE AKIP Dishub Kota Bekasi Tahun 2024

Adapun faktor penyebab keberhasilan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam penyusunan dokumen SAKIP 2024 Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melaksanakan seluruh tindak lanjut dari Laporan Hasil Reviu dari Inspektorat Kota Bekasi dan telah dievaluasi oleh tim evaluasi Sakip Kota.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam sektor transportasi dan perhubungan. Selain menjalankan fungsi pokoknya dalam pengaturan, pembinaan, pengendalian, serta pengawasan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan, Dinas Perhubungan juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diwujudkan melalui berbagai layanan yang dikelola, seperti retribusi parkir, terminal, izin penyelenggaraan angkutan, pengujian kendaraan bermotor, dan pemanfaatan fasilitas perhubungan lainnya. Dengan demikian, Dinas Perhubungan Kota Bekasi tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis dalam mewujudkan sistem transportasi yang tertib, aman, dan nyaman, tetapi juga sebagai salah satu unsur penting dalam memperkuat basis pendapatan daerah yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun hasil evaluasi pendapatan pada dinas perhubungan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024

N O	JENIS RETRIBUSI	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	6	7	8	6	7	8	6	7	8	6	7	8	6	7	8
1	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	3.532.996.020,00	4.199.990.000,00	118,88	3.334.164.930,00	5.326.767.800,00	159,76	4.455.227.052,00	5.469.960.400,00	122,78	6.561.622.500,00	7.105.078.900,00	108,28	-	-	-
2	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH MCK TERMINAL	120.348.600,00	115.425.000,00	95,91	140.602.400,00	137.931.000,00	98,10	140.602.400,00	144.216.000,00	102,57	140.602.400,00	141.804.000,00	100,85	140.603.000,00	143.283.000,00	101,91
3	PSU TERMINAL	174.215.400,00	140.462.400,00	80,63	350.000.000,00	36.338.700,00	10,38	350.000.000,00	212.885.257,00	60,82	350.000.000,00	184.227.975,00	52,64	243.427.000,00	77.134.715,00	31,69
4	RETRIBUSI TERMINAL	985.211.400,00	1.001.744.000,00	101,68	1.252.012.000,00	996.030.500,00	79,55	1.053.919.000,00	1.066.239.000,00	101,17	1.103.919.000,00	1.084.757.000,00	98,26	-	-	-
5	RETRIBUSI IJIN TRAYEK	68.522.270,00	25.730.000,00	37,55	46.140.000,00	11.699.400,00	25,36	24.420.000,00	9.226.500,00	37,78	36.750.000,00	6.120.100,00	16,65	-	-	-
6	PARKIR TEPI JALAN	-	-	-	714.168.000,00	367.044.500,00	51,39	1.362.600.000,00	900.137.500,00	66,06	1.362.600.000,00	1.465.664.000,00	107,56	1.403.478.000,00	1.006.128.500,00	71,69
7	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI	80.000.000,00	122.133.600,00	152,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	4.961.293.690	5.605.485.000,00	112,98	5.837.087.330	6.875.811.900,00	117,80	7.386.768.452	7.802.664.657,00	105,63	9.555.493.900	9.987.651.975,00	104,52	1.787.508.000	1.226.546.215,00	68,62

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan

Berdasarkan tabel diatas dari 5 tahun evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi dapat disimpulkan pada tahun 2020 sampai 2023 capaian melebihi dari target. Pada tahun 2024 terdapat 3 jenis retribusi yang tidak dipungut lagi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu

1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Retribusi Terminal
3. Retribusi Ijin Trayek

Tabel 2.14.Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

PROGRA M	TA 2020		TA 2021			TA 2022			Persen tase Pening katan Pagu 2021- 2022	TA 2023			Persen tase Pening katan Pagu 2022- 2023	TA 2024			Persen tase Pening katan Pagu 2023- 2024
	Pa gu	Real isasi	Pagu	Realisas i	%	Pagu	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%		Pagu	Realisas i	%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	Rp 51.382.13 3.400	Rp 48.417.9 30.911	94%	Rp 53.448.43 0.290	Rp 50.392.44 3.218	94%	4,02%	Rp 50.730.75 7.835	Rp 48.556.20 9.939	96%	-5,08%	Rp 49.206.70 8.480	Rp 46.214.7 67.284	94%	-3,00%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	n/a	n/a	Rp 51.209.51 4.000	Rp 46.787.7 71.708	91%	Rp 82.936.21 2.073	Rp 77.578.21 2.939	94%	61,95%	Rp 68.421.25 4.130	Rp 57.113.15 5.758	83%	- 17,50%	Rp 51.132.06 9.860	Rp 41.374.2 36.418	81%	- 25,27%
JUMLAH			Rp 102.591.6 47.400	Rp 95.205.7 02.619	92,8 0%	Rp 136.384.6 42.363	Rp 127.970.6 56.157	93,9 1%	32,94%	Rp 119.152.0 11.965	Rp 105.669.3 65.697	89,5 9%	- 12,64%	Rp 100.338.7 78.340	Rp 87.589.0 03.702	87,4 2%	- 15,79%

Sumber Dinas Perhubungan 2025

Berdasarkan Tabel diatas Dinas Perhubungan memiliki dua Program yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; (2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), mulai dilaksanakan tahun 2021.

Secara rinci dapat diuraikan per program Dinas Perhubungan dari tahun 2021 sampai 2024 sebagai berikut:

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi dan dapat dikatakan stabil dengan rata-rata persentase 94%.

5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pada program ini terdapat penurunan capaian realisasi pada tahun 2023 dan tahun 2024. Ini disebabkan beberapa ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, seperti pengadaan bukti uji lulus berkala yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3291 TAHUN 2021 yang menjelaskan masa pakai tiga tahun.

Pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan wajib serta indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel 2.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal															
			Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian
1	Angkutan Jalan	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota.	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	98%	130%	75%	82%	109%	75%	98%	130%
			Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60%	75%	125%	60%	75%	125%	60%	75%	125%	60%	75%	125%	60%	75%	125%
		Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal															
			Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian
			Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	4,00%	10%	40%	4,00%	10%	40%	4,00%	10%	40%	4,00%	10%	40%	12,50%	31%
		Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan Pengujian bermotor bagi Kabupaten/Kota yang Kendaraan memiliki populasi kendaraan wajib uji Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	1525%	2542%	60%	1538%	2563%	60%	1640%	2733%	60%	1715%	2858%	60%	1847%	3079%
		Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal																
			Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			
				Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian	
			Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	30%	30%	100%	30%	30%	100%	30%	30%	100%	30%	30%	100%	30%	30%	100%	100%
		Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%	110%	110%	100%	110%	110%	100%	110%	110%	100%	110%	110%	100%	110%	110%	

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal															
			Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian	Target Nilai	Realisasi	Capaian
		Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan Perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan Jalan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%	n/a	n/a	60%	n/a	n/a	60%	n/a	n/a	60%	72%	120%	60%	72%	120%

Sumber SPM Dinas Perhubungan

Berdasarkan data tersebut pada Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota.

Dilihat indikator berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2023-2024 faktor pelayanan yang telah mencapai sesuai target sehingga rasio pencapaian kinerja sebesar 100 diantaranya :

- Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota tercapai dan melebihi dari target yaitu 130%.

Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota tercapai dan melebihi dari target yaitu 125%

- Fasilitas Perlengkapan Jalan

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Kabupaten/ Kota tercapai sesuai target yang harus dicapai yaitu sebesar 120%

- Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji tercapai target yang harus dicapai yaitu sebesar 1847%, faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah disamping pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di kantor juga dilaksanakan secara keliling.

- Sumber Daya Manusia (SDM)

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/ Kota yang telah memiliki terminal tercapai sesuai target yang harus dicapai yaitu sebesar 100%.

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor tercapai sesuai target yang harus dicapai yaitu sebesar 100%.

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum tercapai sesuai target yang harus dicapai yaitu sebesar 100%.

- Keselamatan

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/ Kota tercapai target yang harus dicapai yaitu sebesar 110%.

Sedangkan indikator berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) faktor pelayanan yang tidak mencapai target sehingga rasio pencapaian kinerja kurang 100 diantaranya:

- Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

2.1.4 Kelompok Sasaran Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Bekasi memiliki peran penting dalam menyelenggarakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan terintegrasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penentuan kelompok sasaran layanan menjadi hal yang strategis untuk memastikan kebijakan dan program yang dijalankan tepat guna. Kelompok sasaran ini mencerminkan keberagaman kebutuhan transportasi di Kota Bekasi yang merupakan kota penyangga ibu kota dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi.

Salah satu kelompok sasaran utama adalah masyarakat umum, khususnya pengguna transportasi publik seperti angkot, bus Trans Patriot, Buskita serta kereta komuter yang menjadi andalan harian warga Bekasi. Layanan seperti penyediaan halte, manajemen lalu lintas, serta program integrasi antar moda diarahkan untuk mendukung kenyamanan dan efisiensi mobilitas masyarakat ini. Selain itu, pengguna kendaraan pribadi juga menjadi perhatian Dinas Perhubungan, terutama dalam hal pengelolaan parkir, rekayasa lalu lintas, dan penegakan aturan berlalu lintas.

Kelompok penting lainnya adalah pelaku usaha transportasi seperti operator angkutan umum, pengusaha logistik, dan penyedia jasa angkutan barang. Dinas Perhubungan Kota Bekasi berupaya memberikan pelayanan dalam bentuk perizinan, pengawasan

operasional, serta pembinaan agar moda transportasi yang dijalankan aman dan sesuai ketentuan. Kehadiran pelaku usaha ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi kota dan perlu dijaga keberlanjutannya melalui dukungan regulasi dan infrastruktur.

Pengemudi dan awak kendaraan juga menjadi kelompok sasaran yang tidak kalah penting. Mereka merupakan garda depan dalam pelayanan transportasi publik. Dinas Perhubungan memberikan layanan seperti uji kelayakan kendaraan (KIR), pelatihan keselamatan berkendara, serta sosialisasi peraturan lalu lintas. Dengan peningkatan kapasitas dan kesadaran pengemudi, diharapkan tingkat kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dan kualitas layanan meningkat.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi terkait fasilitas lalu lintas mencakup berbagai lapisan masyarakat yang berinteraksi langsung dengan infrastruktur jalan dan sistem transportasi kota. Masyarakat umum, khususnya pengguna kendaraan pribadi dan pengendara roda dua, menjadi sasaran utama dalam upaya peningkatan fasilitas lalu lintas seperti rambu-rambu, marka jalan, lampu lalu lintas, serta fasilitas keselamatan di persimpangan. Selain itu, pengguna sepeda juga menjadi perhatian Dinas Perhubungan, melalui penyediaan yang aman, zebra cross, dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya. Pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok prioritas, terutama dalam penyediaan fasilitas penyeberangan yang aman dan ramah difabel. Dinas Perhubungan juga menyoroti pengemudi angkutan umum dan logistik dalam pengaturan jalur khusus, terminal, dan area parkir agar arus lalu lintas tetap lancar dan tertib. Melalui pelayanan yang berfokus pada peningkatan fasilitas lalu lintas, Dishub Kota Bekasi berupaya menciptakan lingkungan transportasi yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh warganya.

Terakhir, Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan seperti kepolisian, Bappedalitbangda, dan Dinas Lingkungan Hidup. Koordinasi ini penting untuk menjalankan program lintas sektor seperti pengurangan emisi kendaraan, peningkatan ketertiban lalu lintas, serta pengembangan transportasi berkelanjutan. Melalui pendekatan menyeluruh terhadap semua kelompok sasaran, Dinas Perhubungan berupaya membangun sistem transportasi yang inklusif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan rencana strategis Dinas Perhubungan tahun 2025 – 2029, terdapat sasaran yaitu “meningkatnya kelancaran lalu lintas” di Kota Bekasi. Dengan adanya sasaran tersebut, diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut.

1. Meningkatnya kelancaran jalan

Untuk mewujudkan kelancaran arus lalu lintas di Kota Bekasi, diperlukan indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dari *outcome* yang dicapai. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah peningkatan nilai rata-rata rasio volume terhadap kapasitas (*v/c ratio*) dan meningkatnya kinerja lalu lintas jaringan jalan. *Outcome* ini menjadi tanggung jawab dari bidang lalu lintas untuk dilaksanakan.

2. Meningkatnya keselamatan lalu lintas

Tingkat fatalitas kecelakaan yang tinggi di Kota Bekasi, membuat pentingnya keberadaan peningkatan keselamatan lalu lintas. Dalam perwujudan keberhasilannya, diperlukan indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dari *outcome* yang dicapai. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah penurunan rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan. *Outcome* ini menjadi tanggung jawab dari bidang pengendalian dan operasional untuk dilaksanakan.

3. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan dapat mengakibatkan berbagai permasalahan, mulai dari kemacetan lalu lintas akibat kapasitas jalan yang tidak memadai, kurangnya fasilitas simpul transportasi seperti halte terminal dan fasilitas integrasi angkutan umum hingga menurunnya kualitas pelayanan transportasi umum yang membuat masyarakat enggan menggunakannya dan beralih ke kendaraan pribadi. Kondisi ini tidak hanya memperparah kepadatan lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan karena minimnya fasilitas keselamatan seperti rambu, marka jalan, APILL dengan ATMS dan penerangan jalan. Selain itu, gangguan terhadap mobilitas masyarakat berdampak pada meningkatnya waktu tempuh dan biaya transportasi, yang pada akhirnya merugikan secara ekonomi dan menurunkan kualitas hidup masyarakat akibat stres serta tingginya tingkat polusi udara dan kebisingan. Meningkatnya pelayanan angkutan umum. Oleh karenanya, perlu dilakukan

peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai kebutuhan masyarakat. Dalam perwujudan keberhasilan *outcome* tersebut, diperlukan indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dari *outcome* yang dicapai. Salah satunya adalah berdasarkan persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan. *Outcome* ini menjadi tanggung jawab dari bidang sarana dan prasarana

4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum

Pelayanan angkutan umum di Kota Bekasi, baik angkutan umum majupun angkutan umum massal yang masih terbatas, belum sepenuhnya menjangkau daerah dan kurangnya penegakan angkutan umum membuat adanya peningkatan penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan suatu kebijakan penggunaan angkutan umum bagi masyarakat. Namun, sebelum melakukan kebijakan tersebut diperlukan peningkatan layanan angkutan umum, baik angkutan umum maupun angkutan umum massal. Dalam perwujudan keberhasilan *outcome* tersebut, diperlukan indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dari *outcome* yang dicapai. Salah satunya adalah berdasarkan peningkatan persentase pelayanan angkutan umum. *Outcome* ini menjadi tanggung jawab bidang angkutan untuk dilaksanakan

2.1.5 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Jawa Barat

Berdasarkan hasil telaah terhadap Renstra Kementrian Perhubungan tahun 2025 – 2029 dalam mewujudkan visi kementerian perhubungan 2025 – 2029 **“Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** dengan misi sebagai berikut.

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan.
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional berbasis ekonomi hijau dan biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara sistemik.
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan kebijakan berbasis teknologi, kesetaraan, dan keberlanjutan.

5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi.
6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau.
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional.
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Arah pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 menetapkan beberapa arah kebijakan utama yang diataranya :

1. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal: Mendorong pembangunan dan peningkatan layanan angkutan umum massal untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat, terutama di kawasan perkotaan.
2. Dekarbonisasi Transportasi dan Energi Hijau: Mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam pembangunan transportasi, termasuk elektrifikasi kendaraan dan penggunaan energi terbarukan, guna mengurangi emisi gas rumah kaca.
3. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Transportasi: Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat kelembagaan untuk mendukung pengelolaan transportasi yang efisien dan efektif.
4. Mobilitas Berkelanjutan dan Inklusif: Mewujudkan sistem transportasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, serta mendukung pembangunan wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi Kementrian Perhubungan menetapkan 8 (delapan) sasaran yaitu :

1. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi Nasional

2. Mewujudkan Transportasi yang Aman, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.
3. Meningkatkan Efisiensi dan Daya Saing Sistem Transportasi Nasional.
4. Mendorong Peran Serta Sektor Swasta dalam Pengembangan Transportasi.
5. Menyediakan Transportasi yang Inklusif dan Berkeadilan.
6. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Transportasi yang Merata dan Terintegrasi
7. Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi
8. Melanjutkan Transformasi Tata Kelola dalam Penyelenggaraan Transportasi Nasional.

Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2025 - 2045 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi, yaitu Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat, pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat di wilayah (Kota Bekasi). Faktor yang bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran operator kendaraan (khususnya angkutan umum) akan pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi. Demikian pula dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi darat terkendala adanya penolakan dari sebagian pihak yang merasa “terusik” dengan keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang akan dibangun/dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Adapun yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan/sasaran tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bekasi dengan pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas.

Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) mempunyai visi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek adalah mewujudkan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi Jabodetabek dalam rangka integrasi pelayanan

transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif.

Misi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek adalah sebagai berikut:

1. Memadukan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi baik intra moda maupun antar moda.
2. Memadukan pembangunan dan pengembangan transportasi perkotaan antar wilayah Jabodetabek dalam satu kesatuan wilayah perkotaan.
3. Mengintegrasikan pengoperasian transportasi perkotaan,
4. Mengintegrasikan rencana pembiayaan transportasi perkotaan

Sasaran dalam mewujudkan visi dan misi yang menjadi landasan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten dalam penyelenggaraan transportasi di kawasan Jabodetabek, adalah sebagai berikut:

1. Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan harus mencapai 60% (enam puluh persen) dari total pergerakan orang;
2. Waktu perjalanan orang rata-rata di dalam kendaraan angkutan umum perkotaan adalah 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan;
3. Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 (tiga puluh) kilometer/jam;
4. Cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan mencapai 80% (delapan puluh persen) dari panjang jalan;
5. Akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 m (lima ratus meter);
6. Setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/iaringan pengumpan (*feeder*) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (*trunk*), melalui satu simpul transportasi perkotaan;
7. Simpul transportasi perkotaan harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda (*park and ride*), dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 m (lima ratus meter);

8. Perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 (tiga) kali.

Cakupan rencana induk ini meliputi 9 (sembilan) pilar kebijakan pembangunan transportasi di Jabodetabek yang meliputi:

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan;
2. Pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan;
3. Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasisjalan;
4. Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel;
5. Pengembangan transportasi terintegrasi;
6. Peningkatan kinerja lalu lintas;
7. Pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan;
8. Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang;
9. Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan.

Dari telaahan diatas terdapat beberapa point yang selaras dengan tugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi diantaranya pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi. Faktor yang akan menjadi penghambat Dinas Perhubungan Kota Bekasi yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana fasilitas angkutan umum massal bagi pengguna transportasi perkotaan. Hal ini menyebabkan kurang minatnya masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Adapun faktor pendorong Adanya peraturan presiden nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi.

Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat dalam dokumen perencanaan mempunyai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Konektivitas Antarwilayah dan Penggunaan Angkutan Umum;
2. Meningkatkan Keselamatan Transportasi Melalui Digitalisasi;
3. Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
4. Meningkatkan Peran Sektor Perhubungan dalam Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Transportasi;
2. Pengembangan Angkutan Umum yang Efisien dan Terjangkau;
3. Penerapan Teknologi Informasi dalam Layanan Transportasi;

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Sektor Perhubungan;
5. Penguatan Kerja Sama Antarinstansi dan *Stakeholder*.

Setidaknya ada 2 butir yang mempunyai keselarasan dengan tugas yang akan diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi, yaitu : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan peningkatan pelayanan transportasi. Faktor yang mungkin akan jadi hambatan bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bekasi yaitu terbatasnya SDM yang mempunyai keahlian di bidangnya sementara ada beberapa SDM yang akan memasuki masa pensiun ataupun mutasi ke instansi lain. Sementara untuk pelayanan angkutan masih ada hambatan dari faktor eksternal yang sifatnya non teknis karena kendala sosial dan kultural. Adapun faktor pendukung yang bisa membantu terlaksananya tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi, yaitu adanya koodinasi yang cukup baik pada pelaksanaan menghadapi angkutan lebaran, natal dan tahun baru serta angkutan umum masih merupakan sarana transportasi utama bagi masyarakat di Kota Bekasi.

2.1.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Ada beberapa poin Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No No. 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bekasi yaitu :

1. Pengembangan Infrastruktur Transportasi.
 - a. Pengembangan sistem transportasi darat dan sungai yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek.
 - b. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pembangunan jalan tol, LRT, BRT, double-double track, dan jalur pedestrian.
2. pembangunan sistem jaringan transportasi.
 - a. sistem jaringan Jalan umum
 - i. sistem jaringan Jalan, Jalan arteri, perbaikan Jalan dan *fly over*, pembangunan *fly over* dan *underpass*.
 - ii. Jalan arteri sekunder, peningkatan fungsi Jalan, perbaikan jaringan Jalan.

- iii. Jalan kolektor, pembangunan jaringan Jalan, *fly over*, underpass, dan perbaikan jaringan Jalan dan *fly over*.
 - iv. Jalan kolektor primer, pembangunan jaringan Jalan, *fly over*, underpass dan perbaikan jaringan Jalan.
 - v. Jalan kolektor sekunder, perbaikan jaringan Jalan.
 - vi. Jalan lokal primer, perbaikan jaringan Jalan.
 - vii. Jalan lokal sekunder, perbaikan jaringan Jalan.
- b. sistem angkutan umum
- i. pengaturan kembali jumlah dan pembatasan jumlah dan jenis armada angkutan umum
 - ii. pengaturan kembali rute trayek angkutan umum
 - iii. peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum
 - iv. kendaraan antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP);
 - v. pengembangan angkutan massal dalam kota berbasis rel
 - vi. pengembangan angkutan massal kota berbasis Jalan
 - vii. pengaturan kembali jumlah dan jenis armada angkutan umum
 - viii. pemanfaatan lajur Jalan tol untuk pelayanan angkutan massal atau jalur khusus angkutan umum (LKAU)
 - ix. pembangunan passing lane pada rute Transjabodetabek
 - x. pembangunan bus line dan halte pada rute Transjabodetabek reguler
 - xi. pengembangan rute Transjabodetabek ekspres; 1) pengembangan rute Transjabodetabek reguler
 - xii. pengembangan angkutan pengumpan (feeder) yang melayani Transjabodetabek
 - xiii. pengawasan angkutan barang
 - xiv. penerapan sistem prioritas bus di persimpangan dan
 - xv. penggunaan kendaraan listrik dan gas

3. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan.

- a. Pengembangan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer dan sekunder, serta jaringan jalan lokal.
 - b. Penataan jaringan jalan berdasarkan fungsinya untuk kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna.
4. Pengembangan Terminal dan Stasiun.
 - a. Rencana terminal penumpang tipe A di Kelurahan Jatimekar (Jatiasih).
 - b. Konversi terminal tipe A menjadi tipe B di Kelurahan Margahayu (Bekasi Timur).
 - c. Terminal penumpang tipe C di Taman Harapan Baru (Medansatria) dan Kayuringin (Bekasi Barat).
 - d. Pengembangan dan penataan stasiun kereta api (Kranji, Bekasi Timur, Medansatria, Cikunir I dan II, dll.).
5. Integrasi Moda dan Transit-Oriented Development (TOD).
 - a. Perencanaan kawasan TOD (Transit Oriented Development) di sekitar simpul transportasi seperti LRT dan MRT.
 - b. Rencana transfer station MRT to MRT dan MRT to Other, seperti di Harapanjaya, Bojongmenteng, dan Bekasi Timur
6. manajemen rekayasa lalu lintas
 - a. pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mengoptimalkan penggunaan angkutan umum yang dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya;
 - b. rencana penanganan parkir
 - c. pengaturan kembali area dan pembatasan waktu untuk parkir sistem *on street* di ruas Jalan yang menimbulkan kemacetan
 - d. penyediaan dan pembangunan prasarana parkir off street
 - e. penerapan sistem elektronik parkir meter
 - f. pengembangan fasilitas perpindahan moda/fasilitas alih moda/fasilitas integrasi intra dan antarmoda
 - g. pengaturan lalu lintas
 - h. pengadaan dan pemasangan fasilitas pelengkap Jalan

- i. penerapan electronic road pricing (ERP) dan pengaturan pengguna sepeda motor
 - j. manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kawasan CBD
 - k. pembangunan dan pengembangan Intelligent Transportation System (ITS)
 - l. pengadaan dan pemeliharaan CCTV di Jalan arteri; dan m) penyelenggaraan hari bebas kendaraan/car free day. -
7. Sistem Transportasi Sungai.

Pengembangan sistem transportasi sungai, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya sebagai bagian dari moda alternatif.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kota. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal – hal yang bersangkutan paut dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi – pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi kota.

Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas faktor yang mempengaruhinya adalah belum tercapainya standar pelayanan minimal untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas/MRLL, Evaluasi Analisa dampak lalu lintas/andalalin, pengelolaan parkir pada kab/kota, tingkat jaringan jalan (LOS) yang rendah, dan masih terdapat 13 titik kemacetan. Adapun 13 titik kemacetan tersebut adalah:
 - a. Jl. Perjuangan (stasiun Bekasi);
 - b. Jl. KH. Agus Salim;
 - c. Simpang Telkom;
 - d. Simpang Gamprit;
 - e. Simpang Sumir;

- f. Simpang Caman;
 - g. Simpang Ratna;
 - h. Simpang Rawa Bugel;
 - i. Jl. Pahlawan;
 - j. Simpang H. Masan (cimuning);
 - k. Simpang KCM (Teluk Pucung);
 - l. Simpang Rawa Bacang (Pondok Melati); dan
 - m. Pertigaan Hankam (Pondok Melati Samping Naga).
2. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah belum tercapainya indikator kinerja utama untuk Persentase pelayanan angkutan yang baik, kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.
 3. Jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang.
 4. Terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan lalu lintas secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.
 5. Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
 6. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

Perubahan berbagai paradigma tersebut diatas sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh

berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan asas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan (Perda dan Perwal) yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Keberanian masyarakat untuk melakukan protes terbuka terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi asas keadilan, menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi produk kebijakan publik yang akan diterapkan dalam skala regional, sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga Dinas Perhubungan Kota Bekasi perlu mengantisipasi berdasarkan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Namun demikian Dinas Perhubungan Kota Bekasi senantiasa menerima semua kritikan dan masukan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan di bidang transportasi.

Demikian pula isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan privatisasi perlu diantisipasi berkenaan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bekasi sebagai pelaksana sebagian kewenangan Pemerintah Kota Bekasi di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sebagai Regulator serta fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan teknis yang mencakup transportasi dihubungkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 kemudian digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Bekasi perlu mengantisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bekasi dan Peraturan Daerah mengenai Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan yang berisi perencanaan, pembinaan, organisasi dan tata laksana di bidang transportasi.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi

dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah:

1. Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.
2. Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan.
3. Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi transportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi.
4. Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi di kota Bekasi serta sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :
 - a. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi.
 - b. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa, penyelenggara serta pemerintah Kota Bekasi kepada seluruh lapisan masyarakat
 - c. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.
 - d. Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

Tabel 2.16. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perhubungan

POTENSI DAERAH MENJADI KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN DINAS PERHUBUNGAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Integrasi Wilayah Regional dan Penataan Kota Berkelanjutan	Tingkat jaringan jalan (Level of service/LOS) yang rendah, masih terdapat titik kemacetan lalu lintas	Integrasi Wilayah Regional dan Penataan Kota Berkelanjutan	Urbanisasi dan Mobilitas Berkelanjutan	Kemacetan dan Efisiensi Mobilitas Perkotaan	Tingginya Tingkat Kemacetan dan Beban Lalu Lintas	Kemacetan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhinya tingkat pelayanan jalan (LOS) cukup rendah masih terdapat titik kemacetan, tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan, fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan / penggantian, Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar, Pemanfaatan ITS dan aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perkotaan, kurangnya SDM MRL.
				Tren urbanisasi mendorong peningkatan kebutuhan mobilitas di kota-kota besar. Dinas Perhubungan Bekasi perlu:	Kemacetan lalu lintas menjadi persoalan besar di kota-kota besar, termasuk Jabodetabek. Pemerintah pusat mendorong penguatan angkutan umum dan manajemen lalu lintas cerdas. Optimalisasi sistem angkutan massal seperti Trans Patriot, BRT, LRT.Manajemen rekayasa lalu lintas berbasis data. Pengaturan operasional	

POTENSI DAERAH MENJADI KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN DINAS PERHUBUNGAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
					kendaraan logistik (truk tanah, angkutan berat).	
				Menerapkan konsep Transit-Oriented Development (TOD), Menyediakan jalur pedestrian dan sepeda yang aman dan nyaman, mendorong integrasi moda transportasi (first-last mile connectivity).	Parkir Liar dan Penataan Kawasan Publik	
		Rekayasa Lalu Lintas Akibat Proyek Infrastruktur			Infrastruktur Jalan yang Belum Merata dan Kurang Memadai	
		Penataan Parkir dan Ruang Publik			Kurangnya Minat terhadap Angkutan Umum	
	Rendahnya minat masyarakat beralih ke moda transportasi umum	Pengembangan Transportasi Umum dan Fasilitas Pendukung	Digitalisasi dan Smart Mobility	Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan dengan pembelian layanan (BTS) Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Angkutan Umum	Kebutuhan Sistem Transportasi Terintegrasi dan Berbasis Teknologi	Belum optimalnya angkutan umum dan angkutan umum massal, faktor yang mempengaruhi fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi, keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai

POTENSI DAERAH MENJADI KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN DINAS PERHUBUNGAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
						serta belum adanya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan angkutan umum massal. Hal ini juga ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator pada SDGs yaitu persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan
			Transformasi digital dalam transportasi mendorong sistem yang lebih efisien dan ramah pengguna, seperti:Penerapan sistem e-ticketing dan manajemen lalu lintas berbasis IoT,Penggunaan aplikasi pemantau arus lalu lintas dan angkutan,Smart halte (seperti yang sudah mulai diterapkan di Kota Bekasi),	Target nasional: 60% kota metropolitan memiliki sistem transportasi publik layak dan terintegrasi. Peningkatan kualitas armada angkutan umum,Pembangunan halte/terminal terstandarisasi dan ramah disabilitas,Integrasi dengan KRL, LRT, dan angkutan daring.		
		Pengendalian Emisi dan Kualitas Udara	Transisi Energi dan Kendaraan Listrik	Pengendalian Pencemaran Udara dari Transportasi		Polusi Udara Akibat Emisi Kendaraan
			Dukungan terhadap kendaraan listrik sejalan dengan agenda nasional dan global untuk energi bersih. Dinas Perhubungan dapat Memfasilitasi	Transportasi menyumbang emisi karbon cukup tinggi, khususnya di wilayah perkotaan padat. Dapat melakukan Program uji emisi kendaraan, Sosialisasi kendaraan ramah lingkungan,Perencanaan transisi ke kendaraan listrik (EV).		

POTENSI DAERAH MENJADI KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN DINAS PERHUBUNGAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			pembangunan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum),Mengadopsi kendaraan operasional berbasis listrik,Menerapkan insentif dan kebijakan ramah EV.			
				Pengembangan Kota Cerdas (Smart City) di Bidang Transportasi		
				Program 100 Smart Cities mendorong integrasi teknologi digital di sektor pelayanan publik, termasuk Transportasi.untuk dapat mencapai itu dapat melakukan seperti;Sistem pengawasan lalu lintas berbasis CCTV dan AI, Aplikasi monitoring kendaraan dan transportasi publik, Halte dan rambu-rambu berbasis sistem informasi <i>real-time</i> .		
		Keselamatan di Perlintasan Kereta Api	Keamanan dan Keselamatan Transportasi	KeselamatanTransportasi dan Penurunan Angka Kecelakaan		Kecelakaan LaluLintas dan Keselamatan Jalan
			Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah global. Solusi yang perlu diterapkan:Sistem peringatan dini di titik rawan kecelakaan, Edukasi dan kampanye keselamatan berlalu lintas, Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap	Indonesia menargetkan penurunan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas sesuai Dekade Aksi Keselamatan Jalan Dunia (UN <i>Decade of Action for Road Safety</i>).untuk dapat mencapai itu dapat melakukan seperti;Audit keselamatan jalan (road <i>safety audit</i>), Perbaikan desain persimpangan dan zebra cross, Edukasi dan penegakan disiplin lalu lintas.		

POTENSI DAERAH MENJADI KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN DINAS PERHUBUNGAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			pelanggaran lintas	lalu		

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara bersamaan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029, termasuk Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Renstra ini menjadi dokumen strategis untuk menjamin kesinambungan pembangunan sektor transportasi, meningkatkan capaian kinerja pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat Kota Bekasi.

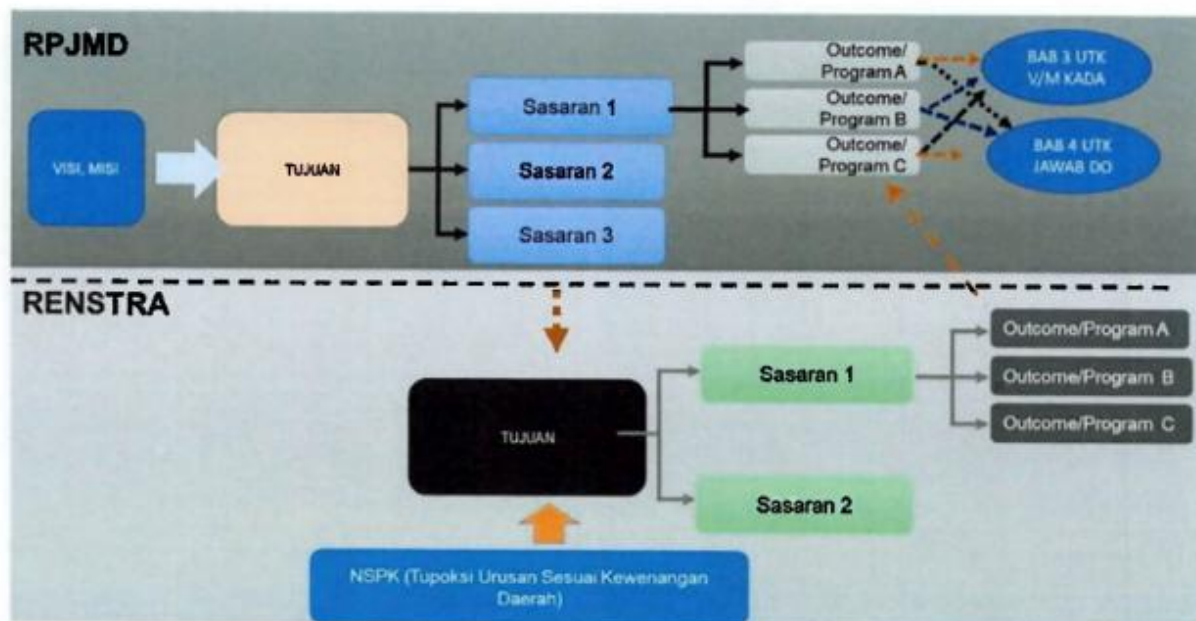
Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 menekankan pendekatan teknokratik melalui manajemen strategik, *logic model*, berpikir sistem, dan sistem dinamik. Diharapkan, dokumen ini dapat menjadi panduan dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi di Kota Bekasi selama lima tahun ke depan, dalam rangka mewujudkan Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dapat menjadi dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas, selaras dengan kebijakan Daerah, Provinsi dan Nasional serta dapat mendorong pencapaian pembangunan yang terencana, efisien dan berkelanjutan dalam 5 tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan persiapan penyusunan Renstra , penyusunan rancangan awal, Penyusunan

rancangan Renstra Perubahan Perangkat Daerah, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Secara diagramatik hal ini disajikan pada Gambar Berikut.

Gambar 3.1.Konsep Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber : InMendagri no.2 Tahun 2025

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Visi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Bekasi terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Bekasi periode 2025 – 2029 atau Visi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”. Dalam upaya-upaya untuk mewujudkan Visi RPJMD tersebut, maka disusunlan dalam 5 Misi sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan
3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi

produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat.
5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren

Dari pernyataan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau misi RPJMD diatas Dinas Perhubungan sesuai tugas dan fungsinya akan berpartisipasi dan mendukung Misi kesatu yaitu “ **Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai** ”. Dari hasil cascading kinerja visi dan misi RPJMD sampai pada outcome dengan memperhatikan program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dihasilkan program prioritas pembangunan daerah. Program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut diperkenalkan dengan “**Sapta Program Kota Bekasi Keren**”, yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi yang ditetapkan. Berdasarkan program unggulan tersebut dinas perhubungan kota bekasi mendukung pada program **GERAKAN KOBE HIJAU** Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan

3.2 Perumusan Tujuan Renstra Dinas Perhubungan

Perumusan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dimulai dari Sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk lebih jelas dalam melihat rumusan dan keselarasan terhadap dukungan Tujuan Renstra Dinas Perhubungan dengan RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. Visi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera
- b. Misi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu Meningkatnya Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan yang Semakin Memuaskan dengan Disukung Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai

- c. Tujuan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika disertai Infrastruktur Modern dan Lestari. Tujuan RPJMD ini merupakan rangkaian kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun dan selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029
- d. Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang diamanahkan dan selaras dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern. Sasaran RPJMD ini merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
- e. Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Layanan Perhubungan. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menurut pengertian Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Strandar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi merumuskan 1 (*satu*) Tujuan sebagai berikut:

Tujuan	: <i>Meningkatnya Layanan Perhubungan</i>
Indikator Tujuan	: <i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan</i>

Dalam rangka mencapai Tujuan tersebut, dirumuskan Sasaran yaitu Rumusan Kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa Hasil Kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah.

Sasaran juga merupakan Penjabaran dari Tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung tujuan adalah :

Sasaran	: <i>Meningkatnya kelancaran lalu lintas</i>
Indikator Sasaran 1	: <i>Persentase penurunan rata-rata V/C Rasio</i>
Indikator Sasaran 2	: <i>Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan</i>

Indikator Sasaran 3 : *Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan*

Indikator Sasaran 4 : *Persentase Peningkatan Pemenuhan pelayanan angkutan umum*

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran Dinas Perhubungan yang merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

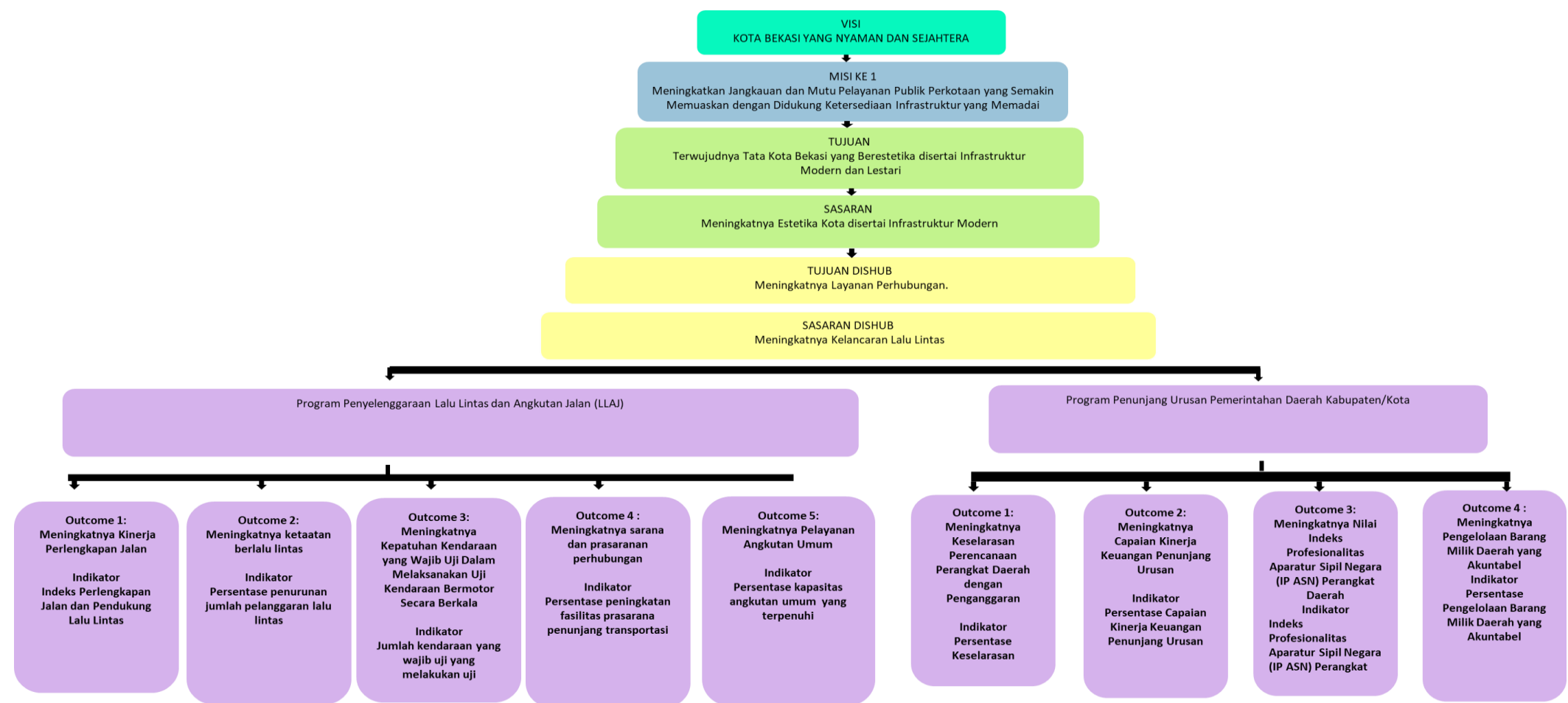
Tabel 3.1. Tenkik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran RPJMD Meningkatnya Estetika Kota Disertai Infrastruktur Modern			Pilar Infrastruktur (IDSD)	Indek	4,83	4,85	4,87	4,89	4,91	4,93
	Meningkatnya Layanan Perhubungan.		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan	Indeks	79,47	80,22	80,97	81,72	82,47	82,47
		Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Persentase penurunan rata- rata V/C Rasio	Persen	1,41%	1,43%	1,45%	2,20%	2,25%	3,07%
			Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Rasio	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23
			Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan	Persen	15	15.7	16.5	17.2	18	18.7
			Persentase Peningkatan Pemenuhan pelayanan angkutan umum	Persen	32	43	52	64	73	77

Sumber Dinas Perhubungan 2025

Berikut digambarkan alur kinerja dari mulai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi sampai dengan tujuan, sasaran sampai outcome (sasaran program) yang terkait Dinas Pehubungan Kota Bekasi.

Gambar 3.2.Cascading Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2029



3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan 2025-2029

3.3.1 Strategi Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang perhubungan sesuai dengan tugas pokok dinas perhubungan kota Bekasi yang terkait dengan pencapaian misi pertama yaitu “ **Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai**”.

Keterkaitan dengan dinas perhubungan kota Bekasi menunjang misi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman di kota Bekasi, maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan untuk terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan secara merata dan berkelanjutan

Faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya Visi dan misi Kota Bekasi diantaranya ;

1. Kemacetan Parah dan Pertumbuhan Kendaraan Pribadi

Tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru sehingga mempengaruhi upaya untuk menekan angka kemacetan.

2. Kurangnya Integrasi Antar Moda

Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan.

3. Keterbatasan Anggaran dan SDM

Peralatan software maupun hardware ATCS yang sudah tua sehingga memerlukan biaya perawatan yang tinggi yang berimbas pada kualitas layanan traffic light.

4. Kurangnya Penegakan Hukum dan Edukasi

Masih banyaknya aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas maupun traffic light sehingga berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan di jalan.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk mewujudkan visi misi Kota Bekasi yaitu :

1. Letak Geografis Strategis

Kota Bekasi terletak di perbatasan antara DKI Jakarta dan provinsi Jawa Barat, Bekasi menjadi jalur vital pergerakan manusia dan barang. Letak ini memungkinkan pengembangan sistem transportasi terpadu yang terintegrasi dengan wilayah Jabodetabek, mendukung terciptanya pelayanan transportasi publik yang efisien dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang sudah berkembang

Transportasi juga menjadi faktor pendorong yang signifikan. Kota Bekasi telah dilalui oleh berbagai moda transportasi seperti KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, jalan tol Becakayu, dan Tol Jakarta–Cikampek. Keberadaan infrastruktur ini membuka peluang untuk mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang saling terhubung, sesuai dengan misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan kehidupan perkotaan yang nyaman dan berkelanjutan.

3. Program pemerintah pusat dan provinsi

Seperti proyek strategis nasional dan integrasi transportasi Jabodetabek, juga menjadi modal penting. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyediaan moda transportasi massal seperti LRT, revitalisasi terminal, dan program integrasi tarif, mempercepat capaian target-target transportasi dalam RPJMD. Hal ini selaras dengan misi kota dalam mengembangkan iklim investasi yang kondusif, karena transportasi yang baik merupakan kunci daya tarik bagi investor.

4. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya transportasi publik dan ramah lingkungan

juga menjadi faktor sosial yang mendukung. Semakin banyak warga Bekasi yang beralih ke KRL atau LRT karena kemacetan dan biaya tinggi penggunaan kendaraan pribadi. Perubahan pola pikir ini menjadi peluang besar untuk memperluas sistem transportasi umum berbasis permintaan (demand-based transport) dan memperkuat konektivitas antarwilayah secara berkelanjutan, sejalan dengan misi meningkatkan kualitas hidup dan membuka lapangan kerja melalui pembangunan sektor transportasi yang inklusif.

Tabel 3.2.Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi

Visi : “ KOTA BEKASI SEMAKIN NYAMAN DAN SEJAHTERA“ .				
No	Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai			
	Program: Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).	- o Kemacetan lalu lintas - o Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum - o Jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang - o Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan lalu lintas secara menyeluruh - o Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa	- o Kemacetan Parah dan Pertumbuhan Kendaraan Pribadi Tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru sehingga mempengaruhi upaya untuk menekan angka kemacetan - o Kurangnya Integrasi Antar Moda Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan	o Letak Geografis Strategis Kota Bekasi terletak di perbatasan antara DKI Jakarta dan provinsi Jawa Barat, Bekasi menjadi jalur vital pergerakan manusia dan barang. Letak ini memungkinkan pengembangan sistem transportasi terpadu yang terintegrasi dengan wilayah Jabodetabek, mendukung terciptanya pelayanan transportasi publik yang

Visi : “ <i>KOTA BEKASI SEMAKIN NYAMAN DAN SEJAHTERA</i> ” .				
No	Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		ruas jalan yang bukan peruntukannya	masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan. o Keterbatasan Anggaran dan SDM Peralatan software maupun hardware ATCS yang sudah tua sehingga memerlukan biaya perawatan yang tinggi yang berimbas pada kualitas layanan traffic light. o Kurangnya Penegakan Hukum dan Edukasi Masih banyaknya aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas maupun trafic light sehingga berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan di jalan.	efisien dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. o Ketersediaan infrastruktur transportasi yang sudah berkembang Transportasi juga menjadi faktor pendorong yang signifikan. Kota Bekasi telah dilalui oleh berbagai moda transportasi seperti KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, jalan tol Becakayu, dan Tol Jakarta–Cikampek. Keberadaan infrastruktur ini membuka peluang untuk mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang saling terhubung, sesuai dengan misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan kehidupan perkotaan yang nyaman dan berkelanjutan. o Program pemerintah pusat dan provinsi Seperti proyek strategis nasional dan integrasi transportasi Jabodetabek,

Visi : “ KOTA BEKASI SEMAKIN NYAMAN DAN SEJAHTERA” .				
No	Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				juga menjadi modal penting. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyediaan moda transportasi massal seperti LRT, revitalisasi terminal, dan program integrasi tarif, mempercepat capaian target-target transportasi dalam RPJMD. Hal ini selaras dengan misi kota dalam mengembangkan iklim investasi yang kondusif, karena transportasi yang baik merupakan kunci daya tarik bagi investor. o Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya transportasi publik dan ramah lingkungan juga menjadi faktor sosial yang mendukung. Semakin banyak warga Bekasi yang beralih ke KRL atau LRT karena kemacetan dan biaya tinggi penggunaan kendaraan pribadi.

Visi : “ <i>KOTA BEKASI SEMAKIN NYAMAN DAN SEJAHTERA</i> ” .				
No	Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				Perubahan pola pikir ini menjadi peluang besar untuk memperluas sistem transportasi umum berbasis permintaan (demand-based transport) dan memperkuat konektivitas antarwilayah secara berkelanjutan, sejalan dengan misi meningkatkan kualitas hidup dan membuka lapangan kerja melalui pembangunan sektor transportasi yang inklusif.

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Pengembangan sistem transportasi Kota Bekasi akan terpenuhi apabila adanya suatu kebijakan serta program yang tepat dan berkesinambungan. Pengembangan infrastruktur transportasi jalan juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas, kemantapan infrastruktur yang telah ada serta melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pembangunan infrastruktur transportasi terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat kota diarahkan pada peningkatan kualitas jalan dengan pola penanganan yang terpadu.

Didalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi persoalan sistem transportasi, strategi yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pembentukan instrument kebijakan *Transport Demand Management* (TDM) dalam mengurangi kendaraan pribadi
- b. Optimalisasi manajemen transportasi kota (penanganan kemacetan, penataan persimpangan);

- c. Melakukan kerjasama dengan SKPD dan instansi terkait dalam hal koordinasi dan pelaksanaan pengaturan/penanganan titik kemacetan;
- d. Meningkatkan penyediaan informasi lalu lintas.
- e. Peningkatan pengendalian dan pengamanan serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.
- f. Mengoptimalkan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
- g. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal
- h. Pengembangan simpul berbasis integrasi antar moda (Park n ride)
- i. Pembuatan Perda baru tentang retribusi ijin trayek dan SIPA guna meningkatkan PAD Kota Bekasi;
- j. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi.

Dari poin-poin diatas dapat dirumuskan penahapan strategi pembangunan yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan strategi Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2026-2029 disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.3. Penahapan Strategi Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2026-2029

TAHAP I 2026	TAHAP 2 2027	TAHAP 3 2028	TAHAP 4 2029	TAHAP 5 2030
Konsolidasi awal program	Peningkatan pelayanan dasar	Percepatan modernisasi	Penguatan infrastruktur & integrasi	Pemantapan layanan berkelanjutan
meliputi peningkatan penataan sarana dan prasarana lalu lintas, inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan, dan penguatan data transportasi	meliputi peningkatan kualitas pelayanan perhubungan, optimalisasi sarana dan prasarana lalu lintas, serta penataan manajemen transportasi perkotaan. Pada tahap ini, Dishub menitikberatkan pada pemetaan kebutuhan perlengkapan jalan, penertiban angkutan umum, serta penyusunan sistem data transportasi yang terintegrasi.	ini diarahkan pada percepatan pembangunan dan modernisasi layanan transportasi. Fokus strategi mencakup digitalisasi layanan perhubungan, pengembangan sistem transportasi cerdas (intelligent transport system),	peningkatan kapasitas jaringan jalan, serta mendorong penggunaan angkutan massal ramah lingkungan.juga memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian lalu lintas dan keselamatan jalan	merupakan fase penguatan dan pemantapan. Strategi pada tahap ini difokuskan pada tercapainya pelayanan transportasi perkotaan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan inklusif. menargetkan peningkatan kualitas angkutan umum perkotaan, efisiensi pengelolaan parkir, penerapan teknologi berbasis smart city, serta pencapaian target indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi.

3.3.2 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Selaras dengan arah kebijakan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dikaitkan dengan tugas dan fungsinya ada pada peningkatan layanan transportasi perkotaan yang terintegrasi dan ramah lingkungan serta peningkatan penanganan kemacetan di berbagai simpul kemacetan. Demikian juga terhadap keselarasan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dengan strategi pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ada pada perwujudan pengembangan sistem transportasi darat dan sungai yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek, yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas untuk mendukung pengembangan jalan tol, light rail train (LRT)
2. Bus Rapid Transit (BRT) dan double-double track
3. s.d 10 (lihat halaman III-18 RPJMD),

maka arah kebijakan Dinas Perhubungan untuk lima tahun ke depan adalah: :

- a. Menerapkan konsep *Transport Demand Management (TDM)* dalam mengurangi kendaraan pribadi;
- b. Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ;
- c. Penempatan petugas pengatur lalu lintas pada daerah rawan kemacetan;
- d. Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU dan kemacetan berbasis IT;
- e. Pengurangan hambatan samping pada jaringan jalan;
- f. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana lalu lintas;
- g. Penerapan penggunaan teknologi informasi pada rekayasa lalu lintas seperti (ITS-ATCS);
- h. Melakukan operasi gabungan penegakan UU LLAJ;
- i. Penertiban dan penegakan hukum secara konsisten pada pelanggaran lalu lintas;
- j. Penyediaan angkutan umum massal (Transpatriot);

- k. Pengintegrasian guna lahan dan jaringan transportasi umum;
- l. Pembangunan gedung *commuter smart parking* (stasiun KA dan LRT);
- m. Pembangunan sarana transportasi *city tourism*.
- n. Pengembangan dan peningkatan terminal

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Araha Kebijakan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Ket.
1	2	3	4	5
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Peningkatan layanan transportasi perkotaan yang terintegrasi dan ramah lingkungan	1 Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan - Mendorong peningkatan kualitas dan jangkauan layanan angkutan umum - Meningkatkan kenyamanan, keterjangkauan, dan keselamatan pengguna. 2 Integrasi Moda Transportasi - Menyusun sistem transportasi perkotaan yang menghubungkan angkutan umum, parkir, dan jalur non-motorized (sepeda/jalan kaki). - Menyediakan titik simpul transportasi yang efektif. 3 Pengelolaan Lalu Lintas Perkotaan - Peningkatan manajemen lalu lintas melalui rekayasa jalan, ATCS (Area Traffic Control System), dan manajemen parkir. - Penataan kawasan rawan macet dan pengendalian arus kendaraan. 4 Transportasi Ramah Lingkungan - Pengembangan angkutan berbasis energi ramah lingkungan (bus listrik/BBG). - Penyediaan sarana prasarana pendukung seperti halte ramah lingkungan dan jalur sepeda. 5 Keselamatan dan Ketertiban Transportasi	
			- Penegakan aturan lalu lintas dan pengawasan angkutan umum. - Edukasi masyarakat terkait keselamatan transportasi perkotaan. 6 Digitalisasi Layanan Transportasi - Penyediaan aplikasi layanan informasi transportasi berbasis digital bagi masyarakat.	
		Peningkatan penanganan kemacetan di	7 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas - Melaksanakan rekayasa arus lalu lintas di titik rawan macet.	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Araha Kebijakan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Ket.
1	2	3	4	5
		berbagai simpul kemacetan	- Optimalisasi rambu, marka, dan traffic light untuk kelancaran arus kendaraan. 8 Penguatan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Berbasis Teknologi - Pengembangan dan optimalisasi <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i>. - Pemasangan CCTV dan sensor lalu lintas untuk pemantauan simpul kemacetan. 9 Penataan Angkutan Umum dan Kendaraan Barang - Pengaturan trayek dan jadwal operasi angkutan umum agar tidak menumpuk di simpul tertentu. - Pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang di ruas jalan utama pada jam sibuk. - Pengaturan dan Penataan kawasan Terminal 10 Pengelolaan dan Penataan Parkir - Penertiban parkir liar yang mengganggu arus lalu lintas. - Pengembangan kantong parkir di sekitar pusat aktivitas. 11 Kolaborasi dan Edukasi Masyarakat - Kampanye budaya tertib lalu lintas untuk mengurangi perilaku yang memicu kemacetan. - Kerjasama dengan kepolisian dan stakeholder terkait untuk operasi lalu lintas di simpul rawan macet.	

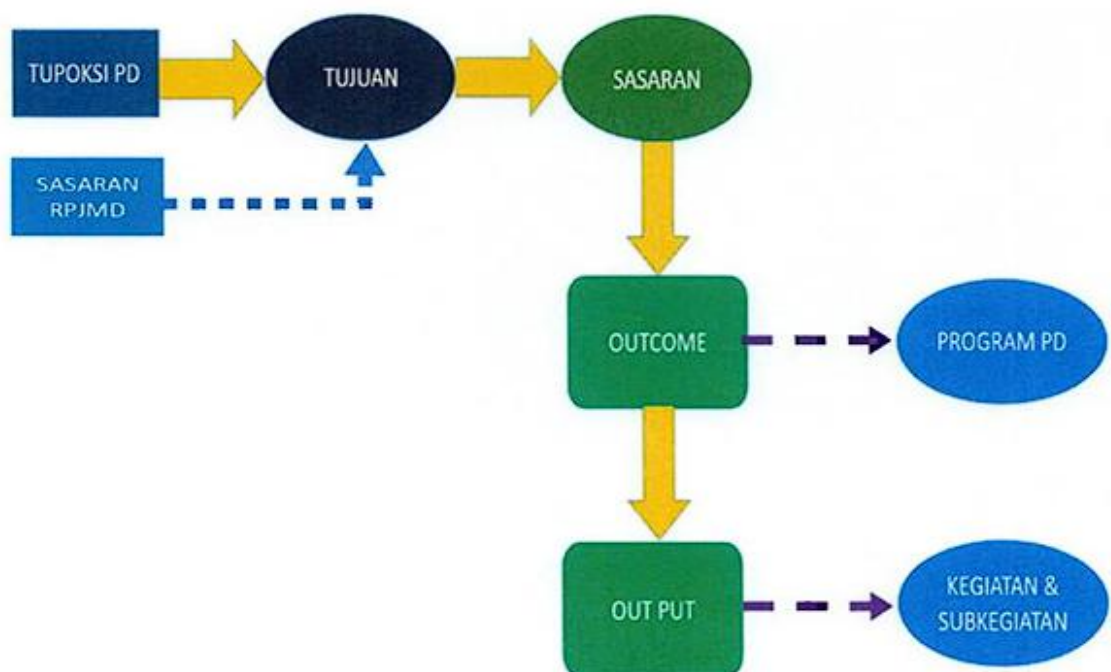
BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Perumusan program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output, berdasarkan tugas fungsi dan sasaran RPJMD.

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Alur pada gambar tersebut menjelaskan proses perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan perangkat daerah. Alurnya dimulai dari Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang menjadi dasar penyusunan perencanaan. Tupoksi ini menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah sesuai mandat dan kewenangan yang dimiliki. Tujuan tersebut kemudian dihubungkan dengan Sasaran RPJMD, yaitu sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah. Keterhubungan ini

memastikan bahwa tujuan perangkat daerah tidak berjalan sendiri, tetapi sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dari tujuan, proses berlanjut ke sasaran perangkat daerah yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran inilah yang menjadi pijakan dalam merumuskan arah capaian nyata di tingkat perangkat daerah. Setelah itu, sasaran tersebut diturunkan menjadi *outcome*, yaitu hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan program. *Outcome* ini bersifat jangka menengah dan menggambarkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Pada tahap ini, *outcome* dihubungkan dengan Program PD, sehingga setiap program yang dirumuskan harus mampu berkontribusi langsung terhadap pencapaian *outcome* yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, *outcome* diturunkan lagi ke level yang lebih operasional, yaitu *output*. *Output* menggambarkan keluaran langsung yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan. *Output* ini kemudian dikaitkan dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang merupakan instrumen nyata pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, setiap kegiatan maupun sub kegiatan harus dapat menghasilkan *output* yang jelas, terukur, dan sesuai dengan *outcome* serta sasaran yang dituju.

Secara keseluruhan, alur ini menunjukkan adanya keterkaitan yang sistematis mulai dari Tupoksi PD → Tujuan → Sasaran → Outcome → Output → Program → Kegiatan dan Sub Kegiatan. Proses ini menegaskan bahwa perumusan program dan kegiatan tidak boleh lepas dari arah kebijakan RPJMD, serta harus berlandaskan pada tugas pokok perangkat daerah. Dengan mekanisme seperti ini, setiap perangkat daerah dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan, mulai dari level strategis hingga operasional, selaras dengan tujuan pembangunan daerah, terukur capaian kinerjanya, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berikut perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Tabel 4.1. Teknik Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern					Pilar Infrastruktur (IDSD)		
	Meningkatnya Layanan Perhubungan.				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan		
		Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas			Persentase penurunan rata-rata V/C Rasio		
					Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan		
					Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan		
					Persentase Peningkatan Pemenuhan pelayanan angkutan umum		
			Meningkatnya kinerja perlengkapan jalan		Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan	Jumlah Perlengkapan jalan yang tersedia	Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbangunan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Sub Kegiatan: Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Sub Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				Terpeliharanya Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
				Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			Meningkatnya ketaatan berlalu lintas		Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Terselenggaranya penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Laporan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kegiatan: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Sub Kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
				Tersusunnya laporan pengawasan dan pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	
				Terbangunya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Sub Kegiatan: Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
				Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Sub Kegiatan: Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
				Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kegiatan: Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
				Tersusunnya Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
			Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan		Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Peningkatan Fasilitas pada Terminal	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kegiatan: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
				Tersedianya sistem informasi manajemen terminal	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Sub Kegiatan: Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	
				Tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas fasilitas terminal.	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Sub Kegiatan: Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Terpeliharanya Fasilitas Utama dan Pendukung pada kawasan terminal	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	
				Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kegiatan: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
				Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan perparkiran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Menigkatnya pelayanan amgkutan umum		Persentase kapasitas angkutan umum yang terpenuhi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Tersedianya unit armada angkutan umum yang disediakan	Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang yang disediakan	Kegiatan: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya unit armada angkutan umum yang dioperasikan.	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Sub Kegiatan: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya dokumen Penetapan Rencana Kawasan Perkotaan Pelayanan Angkutan Perkotaan	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Kawasan Perkotaan Pelayanan Angkutan Perkotaan	Kegiatan: Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen analisis penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan	Kegiatan: Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan yang Wajib Uji dalam Melaksanakan Uji Kendaraan Bermotor secara Berkala		Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Terselenggaranya Pengujian berkala kendaraan bermotor	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengujian kendaraan bermotor	Kegiatan: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersedianya sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				tersedianya oprasional dalam rangka pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Sub Kegiatan: Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
				tersedianya bukti uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan: Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				terpeliharanya sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan NSPK	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tertatanya arsip SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2029, akan dilaksanakan 2 (dua) program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program yang diturunkan dalam kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Neger Nomor 2 Tahun 2025 dimulai dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030. Tahun 2023 ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah untuk pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

Program-program tersebut yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan yang berjumlah 16 (enam belas) kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET		
							2025		2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		TARGET	PAGU (Rp)
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																		
	Outcome 1: Meningkatkan Kinerja Perengkapan Jalan			Indeks Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	N/A	85,6 Indeks	92.720.275.760	85.63 Indeks	76.716.310.524	85.65 Indeks	97.314.207.860	85.79 Indeks	99.467.330.860	85.80 Indeks	100.567.330.860	85.82 Indeks	102.267.330.860		
	Kegiatan 1: Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
	Outcome: Tersedianya Perengkapan Jalan di Jalan			Jumlah Perengkapan jalan yang tersedia	464 Unit	8505 Unit	92.720.275.760	6640 Unit	76.716.310.524	7539 Unit	97.314.207.860	7760 Unit	99.467.330.860	7760 Unit	100.567.330.860	7819 Unit	102.267.330.860		
	Sub Kegiatan 1: Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
	Output: Terbangunan Prasarana Jalan			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	4 Unit	2 Unit	200.000.000	14 Unit	200.000.000	6 Unit	600.000.000	6 Unit	1.300.000.000	6 Unit	1.300.000.000	6 Unit	1.300.000.000		
	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
	Output: Tersedianya Fasilitas Perengkapan Jalan di Jalan			Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	359 Unit	4766 Unit	15.590.805.900	2940 Unit	7.440.000.000	3540 Unit	15.465.944.000	3705 Unit	18.000.000.000	3705 Unit	19.000.000.000	3705 Unit	20.500.000.000		
	Sub Kegiatan 3: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
	Output:			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	0 Unit	-	8 Unit	150.000.000	8 Unit	300.000.000	8 Unit	300.000.000	8 Unit	300.000.000	8 Unit	300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET		PAGU (Rp)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Terpeliharanya Prasarana Jalan																
	Sub Kegiatan 4: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																
	Output: Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	99 Unit	3737	76.929.469.860	3678 Unit	68.926.310.524	3985 Unit	80.948.263.860	4041 Unit	79.867.330.860	4041 Unit	79.967.330.860	4100 Unit	80.167.330.860	
	Outcome 2: Meningkatnya ketaatan berlalu lintas		Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	10%	12%	2.109.146.487	13%	1.247.000.000	13,50%	6.473.208.480	14%	8.473.208.480	14,50%	10.173.208.480	15%	10.673.208.480	
	Kegiatan 2 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
	Output: Terselenggaranya penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas		Jumlah Laporan manajemen dan rekayasa lalu lintas	7 Laporan	22 Laporan	2.109.146.487	12 Laporan	1.237.000.000	14 Laporan	6.323.208.480	14 Laporan	8.323.208.480	14 Laporan	10.023.208.480	14 Laporan	10.523.208.480	
	Sub Kegiatan 1: Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
	Output: Tersusunnya Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	2 Laporan	725.000.000	3 Laporan	500.000.000	5 Laporan	1.500.000.000	5 Laporan	2.500.000.000	5 Laporan	2.700.000.000	5 Laporan	2.700.000.000	
	Sub Kegiatan 2: Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																
	Output:		Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka	2 Dokumen	4 Dokumen	446.538.247	5 Dokumen	-	5 Dokumen	2.500.000.000	5 Dokumen	3.000.000.000	5 Dokumen	4.000.000.000	5 Dokumen	4.500.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET ·	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET		PAGU (Rp)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tersedianya Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
	Sub Kegiatan 3: Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota																
	Output: Tersusunnya laporan pengawasan dan pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	14 Laporan	599.104.000	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	1.500.000.000	2 Laporan	2.000.000.000	2 Laporan	2.500.000.000	2 Laporan	2.500.000.000	
	Sub Kegiatan 4: Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)																
	Output : Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah		Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	2 Unit	2 Unit	160.716.800	4 Unit	160.000.000	4 Unit	468.683.600	4 Unit	468.683.600	4 Unit	468.683.600	4 Unit	468.683.600	
	Sub Kegiatan 5: Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)																
	Output : Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 Unit	2 Unit	177.787.440	4 Unit	177.000.000	4 Unit	354.524.880	4 Unit	354.524.880	4 Unit	354.524.880	4 Unit	354.524.880	
	Kegiatan 3 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan																
	Output: Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	
	Sub Kegiatan 1:																

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET ·	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET		PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																	
Output: Tersusunnya Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000		
Outcome 3: Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan yang Wajib Uji Dalam Melaksanakan Uji Kendaraan Bermotor Secara Berkala		Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	68000 Kendaraan	69.000 Kendaraan	1.471.193.953	70.000 Kendaraan	1.400.000.000	71.000 Kendaraan	2.600.000.000	72.000 Kendaraan	2.800.000.000	73.000 Kendaraan	3.550.000.000	74.000 Kendaraan	3.550.000.000		
Kegiatan 4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
Output: Terselenggaranya Pengujian berkala kendaraan bermotor		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengujian kendaraan bermotor	100%	100%	1.471.193.953	100%	1.400.000.000	100%	2.600.000.000	100%	2.800.000.000	100%	3.550.000.000	100%	3.550.000.000		
Sub Kegiatan 1: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10 Unit	56 Unit	191.571.953	30 Unit	100.000.000	15 Unit	700.000.000	15 Unit	700.000.000	15 Unit	700.000.000	15 Unit	700.000.000		
Sub Kegiatan 2: Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																	
Tersedianya oprasional dalam rangka pelaksanaan		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	45.000 Unit	69.000 Unit	714.572.000	60.000 Unit	500.000.000	61.000 Unit	900.000.000	61.000 Unit	900.000.000	61.000 Unit	900.000.000	61.000 Unit	900.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET .	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET		PAGU (Rp)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	pengujian berkala kendaraan bermotor																
Sub Kegiatan 3: Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
	Output : Tersedianya bukti uji berkala kendaraan bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	1.250.000.000	1 Dokumen	1.250.000.000	
Sub Kegiatan 4: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
	Output: terpeliharanya sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	18 unit	21 Unit	465.050.000	24 Unit	400.000.000	21 Unit	500.000.000	21 Unit	700.000.000	21 Unit	700.000.000	21 Unit	700.000.000	
	Outcome 4 : Meningkatnya sarana dan prasaranan perhubungan		Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	49,50%	51,72%	1.343.143.200	56,90%	1.227.332.993	57,76%	2.300.000.000	60,34%	2.300.000.000	61,21%	2.300.000.000	61,21%	2.300.000.000	
Kegiatan 5 : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C																	
	Output : Tersedianya Peningkatan Fasilitas pada Terminal		Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit	2 Unit	550.000.000	5 Unit	777.332.993	5 Unit	1.100.000.000	5 Unit	1.100.000.000	5 Unit	1.100.000.000	5 Unit	1.100.000.000	
Sub Kegiatan 1: Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C																	
	Output:		Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET .	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET		PAGU (Rp)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tersedianya sistem informasi manajemen terminal		terminal tipe C baik secara Manual dan Digital														
Sub Kegiatan 2: Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																	
	Output: Tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas fasilitas terminal.		Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	0 Unit	0 unit	-	2 Unit	377.332.993	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	
Sub Kegiatan 3 : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)																	
	Output: Terpeliharanya Fasilitas Utama dan Pendukung pada kawasan terminal		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	550.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	600.000.000	2 Unit	600.000.000	2 Unit	600.000.000	2 Unit	600.000.000	
Kegiatan 6 : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																	
	Output: Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 Laporan	1 Laporan	793.143.200	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	1.200.000.000	1 Laporan	1.200.000.000	1 Laporan	1.200.000.000	1 Laporan	1.200.000.000	
Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
	Output :		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	1.200.000.000	1 Dokumen	1.200.000.000	1 Dokumen	1.200.000.000	1 Dokumen	1.200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		TARGET	PAGU (Rp)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir		Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
	Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																
	Output : Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota perparkiran		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	793.143.200	1 Laporan	450.000.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
	Outcome 5: Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum		Persentase kapasitas angkutan umum yang terpenuhi	20,45%	70%	4.952.200.000	75%	17.200.000.000	78%	19.700.000.000	80%	21.500.000.000	83%	25.500.000.000	85%	34.233.904.000	
	Kegiatan 7: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
	Output: Tersedianya unit armada angkutan umum yang disediakan		Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang yang disediakan	100%	100%	4.852.200.000	100%	17.200.000.000	100%	19.300.000.000	100%	21.300.000.000	100%	25.300.000.000	100%	34.033.904.000	
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
	Output: Tersedianya unit armada angkutan umum yang dioperasikan.		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	9 Unit	21 Unit	4.801.500.000	20 Unit	17.000.000.000	24 Unit	19.000.000.000	28 Unit	21.000.000.000	32 Unit	25.000.000.000	34 Unit	33.733.904.000	
	Sub Kegiatan 2:																

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		TARGET	PAGU (Rp)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota																	
	Output: Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	1 Laporan	50.700.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	
Kegiatan 8 : Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
	Output: Tersusunnya dokumen Penetapan Rencana Kawasan Perkotaan Pelayanan Angkutan Perkotaan		Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Kawasan Perkotaan Pelayanan Angkutan Perkotaan	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	
Sub Kegiatan 1 : Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	Output: Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan		Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	
Kegiatan 9 : Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
	Output: Tersedinya dokumen analisis penetapan Tarif Kelas Ekonomi		Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET .	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET		PAGU (Rp)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek																
	Sub Kegiatan 1 : Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
	Output: Tersusunnya Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan		Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	Outcome 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	73.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	160.000.000	
	Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	Output: Tersusunnya Dokumen Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan NSPK	5 Dokumen	6 Dokumen	73.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	80.000.000	5 Dokumen	125.000.000	6 Dokumen	150.000.000	6 Dokumen	160.000.000	
	Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
	Output: Tersusunnya Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET .	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET		PAGU (Rp)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Perencanaan Perangkat Daerah																
	Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
	Output: Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dokumen	5 Laporan	3.000.000	9 Laporan	10.000.000	9 Laporan	30.000.000	9 Laporan	50.000.000	9 Laporan	50.000.000	9 Laporan	60.000.000	
	Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	93,92%	94.42%	92.808.830.420	95.5%	78.029.778.000	95.5%	217.821.272.010	96%	225.529.879.128	96.42%	235.496.927.198	97%	238.261.167.075	
	Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
	Output: Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	1 Laporan	54.443.724.000	1 Laporan	71.663.728.000	1 Laporan	139.979.772.010	1 Laporan	142.086.879.128	1 Laporan	146.622.427.198	1 Laporan	149.061.667.075	
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
	Output:					54.440.724.000		71.653.728.000									

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET		
							2025		2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		TARGET	PAGU (Rp)
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2506 Orang/bula n	2506 Orang/bula n		15204 Orang/bula n		15204 Orang/bula n	139.949.772.01 0	15204 Orang/bula n	142.036.879.12 8	15204 Orang/bula n	146.572.427.19 8	15204 Orang/bula n	149.011.667.07 5	
Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
	Output: Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000			
Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	24 Laporan	24 Laporan	36.779.697.618	24 Laporan	4.759.050.000	24 Laporan	75.041.500.000	24 Laporan	80.523.000.000	24 Laporan	85.784.500.000	24 Laporan	85.984.500.000			
Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	Output: Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.256.600.000	12 Laporan	1.500.000.000	12 Laporan	71.741.500.000	12 Laporan	76.823.000.000	12 Laporan	82.034.500.000	12 Laporan	82.234.500.000			
Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	Output: Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	35.523.097.618	12 Laporan	3.259.050.000	12 Laporan	3.300.000.000	12 Laporan	3.700.000.000	12 Laporan	3.750.000.000	12 Laporan	3.750.000.000			
Kegiatan 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah																			

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET .
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Output: Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	9 Laporan	8 Laporan	1.585.408.802	9 Laporan	1.607.000.000	9 Laporan	2.800.000.000	9 Laporan	2.920.000.000	9 Laporan	3.090.000.000	9 Laporan	3.215.000.000	
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
	Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantoR		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	85.000.000	
	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
	Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	4 Paket	200.000.000	4 Paket	500.000.000	4 Paket	500.000.000	4 Paket	500.000.000	4 Paket	500.000.000	
	Sub Kegiatan 3: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
	Output: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	253.589.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	
	Sub Kegiatan 4: Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
	Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	923.227.500	4 Paket	900.000.000	4 Paket	1.400.000.000	4 Paket	1.450.000.000	4 Paket	1.500.000.000	4 Paket	1.550.000.000	
	Sub Kegiatan 5: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		TARGET	PAGU (Rp)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Output: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	111.732.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	210.000.000	2 Paket	220.000.000	2 Paket	230.000.000	2 Paket	240.000.000	
	Sub Kegiatan 6: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
	Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
	Sub Kegiatan 7: Fasilitasi Kunjungan Tamu																
	Output: Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	1 Laporan	154.645.302	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	160.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	190.000.000	
	Sub Kegiatan 8: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
	Output: Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1 Laporan	67.333.000	1 Laporan	67.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	
	Sub Kegiatan 9: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
	Output: Tertatanya arsip SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.882.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	
	Outcome 3:			N/A	86.5	276.380.500	86.75	1.100.000.000	87	2.100.000.000	87.25	1.900.000.000	87.50	1.500.000.000	87.75	2.000.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET ·	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET		PAGU (Rp)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah														
Kegiatan 5 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
	Output: Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	3 Laporan	3 Laporan	276.380.500	1 Laporan	1.100.000.000	3 Laporan	2.100.000.000	3 Laporan	1.900.000.000	2 Laporan	1.500.000.000	2 Laporan	2.000.000.000	
	Sub Kegiatan 1: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																
	Output: Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	110.301.966	2 Paket	1.100.000.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	750.000.000	2 Paket	1.000.000.000	
	Sub Kegiatan 2: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
	Output: Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50 Orang	53.705.500	0 Orang	-	70 Orang	650.000.000	70 Orang	500.000.000	50 Orang	750.000.000		-	
	Sub Kegiatan 3: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
	Output: Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	80 Orang	112.373.034	0 orang	-	100 orang	700.000.000	100 orang	650.000.000		-	100 orang	1.000.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET ·	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET		PAGU (Rp)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Perundang-Undangan																
	Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	2.751.143.150	100%	2.751.143.150	100%	6.862.838.000	100%	7.775.021.000	100%	9.375.021.000	100%	9.875.021.000	
Kegiatan 6 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	Output: Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	0 Laporan	3 Laporan	886.945.034	2 Laporan	779.184.000	2 Laporan	3.000.000.000	2 Laporan	3.500.000.000	2 Laporan	5.000.000.000	2 Laporan	5.000.000.000	
Sub Kegiatan 1: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
	Output: Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	1 Unit	200.000.000	5 Unit	700.000.000	5 Unit	2.500.000.000	5 Unit	3.000.000.000	5 Unit	4.500.000.000	5 Unit	4.500.000.000	
Sub Kegiatan 2: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	Output: Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	25 Unit	484.937.000	35 Unit	79.184.000	35 Unit	500.000.000	35 Unit	500.000.000	35 Unit	500.000.000	35 Unit	500.000.000	
Sub Kegiatan 3: Pengadaan Mebel																	
	Output: Tersedianya Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	paket	169 Unit	202.008.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET .	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET		PAGU (Rp)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kegiatan 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	4 Laporan	4 Laporan	1.864.198.116	4 Laporan	1.971.959.150	4 Laporan	3.862.838.000	4 Laporan	4.275.021.000	4 Laporan	4.375.021.000	4 Laporan	4.875.021.000	
Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	9 Unit	180.000.000	9 Unit	180.000.000	9 Unit	200.000.000	9 Unit	250.000.000	9 Unit	250.000.000	9 Unit	250.000.000	
Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 unit	149 Unit	1.004.459.150	205 Unit	1.104.459.150	177 Unit	2.962.838.000	177 Unit	3.325.021.000	177 Unit	3.425.021.000	177 Unit	3.525.021.000	
Sub Kegiatan 3: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
Output: Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 unit	50 Unit	87.864.000	50 Unit	87.500.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	100.000.000	
Sub Kegiatan 4: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		TARGET	PAGU (Rp)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Output: Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	3 Unit	591.874.966	3 Unit	600.000.000	3 Unit	600.000.000	3 Unit	600.000.000	3 Unit	600.000.000	3 Unit	1.000.000.000	
			TOTAL			198.505.313.47 0		179.691.564.66 7		355.251.526.35 0		369.870.439.46 8		388.612.487.53 8		403.320.631.41 5	

Sumber RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

4.2 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, telah dirumuskan 7 (tujuh) program prioritas Pembangunan daerah “Sapta Program Kota Bekasi Keren” antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE SEHAT**); semangat
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE CERDAS**);
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE HIJAU**);
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKARYA**);
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE MENARIK**);
6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERSINERGI**);
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKINERJA**).

Dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bekasi melaksanakan sub kegiatan prioritas sebagai berikut:

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kinerja perlengkapan jalan	Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Mendukung Prioritas: Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU
			Sub Kegiatan: Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
			Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
		Meningkatnya ketaatan berlalu lintas	Kegiatan: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
			Sub Kegiatan: Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan: Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
			Sub Kegiatan: Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
			Kegiatan: Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Perusahaan Angkutan Umum	
		Meningkatnya sarana dan prasaranan perhubungan	Kegiatan: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
			Kegiatan: Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan: Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Selain mendukung program prioritas, Dinas Perhubungan juga mendukung sasaran prioritas yang menjadi target Wali Kota pada

Tahun 2025-2029. Sasaran prioritas dimaksud adalah Tersedianya Infrastruktur Jalan Kota, Perparkiran, dan Lingkungan yang Semakin Tertata, Nyaman Didukung dengan Terciptanya Keterpaduan antar Moda Transportasi perkotaan yang Lebih Mudah, Teratur, Terintegrasi, Tertata Nyaman dan Mengurangi Kemacetan. Sasaran priroitas ini masuk dalam Gerakan Kobe Hijau.

Terdapat 1 program dan 14 sub kegiatan pada Dinas Perhubungan yang mendukung sasaran prioritas kepala daerah. Dalam 14 sub kegiatan yang mendukung sasaran prioritas, ada 11 sub kegiatan yang teridentifikasi mendukung juga di program prioritas. Sehingga ada 3 sub kegiatan yang teridentifikasi hanya memberikan dukungan pada sasaran prioritas, yaitu:

- a. Rehabilitas dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
- b. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi tersebut, maka target IKU Dinas Perhubungan Kota Bekasi seperti pada tabel berikut

Tabel 4.4. IKU Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase penurunan rata-rata V/C Rasio	Persen	1,41	1,43	1,45	2,20	2,25	3,07	
2	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Rasio	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	
3	Persentase Peningkatan sarana dan	Persen	15	15.7	16.5	17.2	18	18.7	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	prasarana Perhubungan								
4	Persentase Peningkatan Pemenuhan pelayanan angkutan umum	Persen	32	43	52	64	73	77	

Sumber Dinas Perhubungan 2025

4.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKK Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2030 disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.5. IKK Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	Indeks	N/A	85.60	85.63	85.65	85.79	85.80	85.80	
2	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	%	10	12	13	13.50	14	14.50	15	
3	Jumlah Kendaraan Yang Wajib Uji yang Melakukan Uji Kendaraan Bermotor	Unit	68.000	69.000	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000	
4	Persentase Peningkatan Fasilitas Prasarana Penunjang Transportasi	%	49,50	51,72	56,9	57,76	60,34	61,21	61,21	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Kapasitas Angkutan Umum yang Terpenuhi	%	20.45	70	75	78	80	83	85	

Sumber RPJMD Kota Bekasi 2025-2029

4.5 DUKUNGAN TERHADAP PENCAPAIAN JABAR ISTIMEWA

Dinas Perhubungan Kota Bekasi memberikan dukungan terhadap pencapaian Jabar Istimewa. Dukungan Jabar Istimewa dimaksud adalah pada Langkah **KAHIJI** yaitu Infrastruktur Istimewa melalui Pembangunan Insfrastruktur Jalan, Listrik, Sanitasi.

Dalam rangka upaya pencapaian tersebut, Dinas Perhubungan dengan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mennggunakan kegiatan dan sub kegiatan yang relevan terhadap hal ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Dukungan Dinas Perhubungan terhadap JABAR Istimewa Langkah Kahiji

No	Jabar Istimewa	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Langkah Kahiji Infrastruktur Isntimewa Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik, Sanitasi	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

No	Jabar Istimewa	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota
				Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
				Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Dinas Perhubungan Kota Bekasi memiliki peran penting melalui tugas pokok dan fungsinya. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan transportasi darat, pengelolaan lalu lintas, angkutan, serta sarana dan prasarana penunjangnya, Dinas Perhubungan berkontribusi langsung dalam penguatan infrastruktur perkotaan yang menjadi bagian dari infrastruktur istimewa Jawa Barat.

Pertama, dalam aspek jalan, Dishub Kota Bekasi berperan melalui kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas, termasuk

penyediaan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu, marka, traffic light, dan area penyeberangan. Hal ini mendukung peningkatan kemantapan jalan provinsi dan kota agar tidak hanya layak secara konstruksi, tetapi juga aman dan tertib digunakan masyarakat.

Kedua, pada aspek listrik, Dishub Kota Bekasi berkontribusi melalui pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Kegiatan pemeliharaan, perbaikan, serta penambahan titik PJU di ruas jalan utama maupun lingkungan mendukung kualitas penerangan jalan, efisiensi energi, sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas pada malam hari. Penerapan teknologi hemat energi (seperti lampu LED dan sistem smart lighting) juga selaras dengan agenda pembangunan infrastruktur modern di Jawa Barat.

Ketiga, dari sisi sanitasi, meskipun bukan tupoksi utama, Dishub Kota Bekasi mendukung melalui penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi di kawasan transportasi seperti terminal, halte, area parkir, serta simpul-simpul transportasi. Kehadiran fasilitas sanitasi ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan transportasi yang bersih, sehat, dan layak bagi pengguna jasa.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tupoksi Dinas Perhubungan Kota Bekasi secara nyata sejalan dengan Langkah Kahiji Jabar: Infrastruktur Istimewa. Sinergi ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan, listrik, dan sanitasi bukan hanya berdimensi fisik, tetapi juga terintegrasi dengan pengelolaan transportasi dan pelayanan publik yang berkualitas. Pada akhirnya, kontribusi Dishub Kota Bekasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan konektivitas yang lancar, penerangan jalan yang memadai, serta fasilitas transportasi yang nyaman bagi masyarakat Kota Bekasi dan Jawa Barat secara keseluruhan.

4.6 DUKUNGAN TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BEKASI

Berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Perhubungan adalah salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai keterlibatan dalam penanggulangan kemiskinan. Terdapat 6 (enam) strategi dan 29 (dua puluh sembilan) arah kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi. Dari 6 (enam) strategi dan 29 (dua puluh sembilan) arah kebijakan tersebut, Dinas Perhubungan mendapat peran pada strategi pengurangan beban pengeluaran dengan arah kebijakan pengurangan beban pengeluaran pendidikan dan

peningkatan akses pendidikan yang diimplementasikan melalui program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota serta sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Penyediaan angkutan umum dalam hal ini penyediaan subsidi transportasi menjadi bagian penting dalam tujuh prioritas pembangunan nasional, khususnya percepatan pengentasan kemiskinan, program ini memastikan kelompok berpenghasilan rendah memiliki akses terjangkau terhadap layanan transportasi untuk bekerja, berusaha, serta memenuhi kebutuhan dasar. Dengan memperkuat konektivitas wilayah dan menekan beban biaya hidup, subsidi transportasi berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan, pemerataan kesempatan, dan percepatan mobilitas sosial masyarakat miskin.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan menyelenggarakan kegiatan subsidi kendaraan angkutan massa seperti BisKita, TransPatriot, dan juga menyelenggarakan armada/bus mudik gratis untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi.

BAB 5

PENUTUP

Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan selama periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun secara simultan serta memperhatikan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025–2029, yaitu visi **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**, serta misi kesatu yaitu **“Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.”**

Untuk mendukung visi dan misi kepala daerah tersebut, diperkenalkan program unggulan “Sapta Program Kota Bekasi Keren”, yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya, sesuai visi yang ditetapkan. Berdasarkan program unggulan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bekasi mendukung Program Gerakan Kobe Hijau: Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 memiliki 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 48 (empat puluh delapan) subkegiatan.

Sehubungan dengan implementasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025–2029, perlu memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan berkewajiban mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dirumuskan

dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.

2. Dinas Perhubungan berkewajiban menyusun Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan dan RPJMD Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Renstra, Dinas Perhubungan Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik lima tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan merupakan bagian dari pencapaian kinerja yang secara moral dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Bekasi.

Bekasi, 19 September 2025
Kepala Dinas Perhubungan



Ir. Zeno Bachtiar, S.Si.T., M.Si., M.T.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19730211 199203 1 002